



**Strategi Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin Cina dalam Krisis Kesehatan Global COVID-19:
Sebuah**

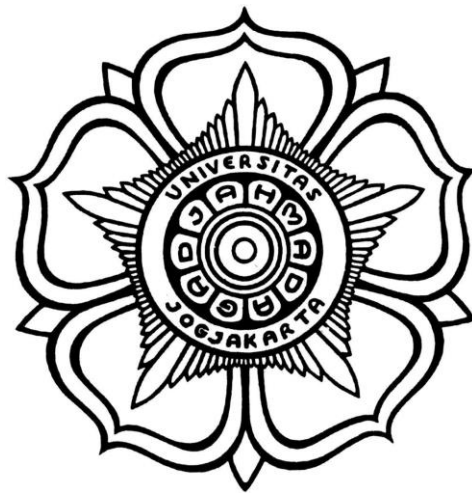
Pendekatan Neoclassical Realism

ANANDA DIMAR BAGASKARA, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**STRATEGI DIPLOMASI MASKER DAN DIPLOMASI VAKSIN CINA
DALAM KRISIS KESEHATAN GLOBAL COVID-19:
SEBUAH PENDEKATAN *NEOCLASSICAL REALISM***

Disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir studi S-1



Ananda Dimar Bagaskara

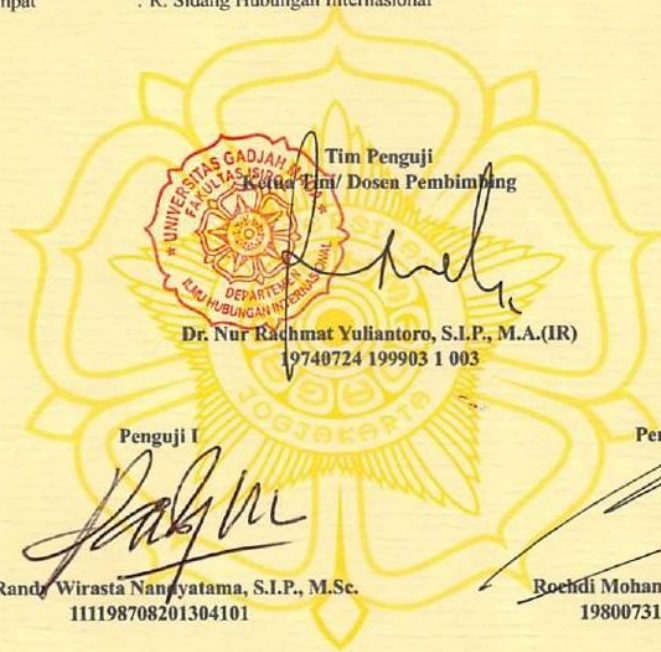
20/455792/SP/29381

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji
Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Nama : Ananda Dimar B
No. Mahasiswa : 20/455792/SP/29381
Judul Skripsi : Strategi Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin Cina dalam Krisis
Kesehatan Global Covid-19: Sebuah Pendekatan Neoclassical Realism
Tanggal Ujian : 10 Januari 2024
Tempat : R. Sidang Hubungan Internasional



Tim Penguji
Ketua Tim/ Dosen Pembimbing

Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A.(IR)
19740724 199903 1 003

Penguji I

Dr. Randu Wirasta Nanyatama, S.I.P., M.Sc.
111198708201304101

Penguji II

Roehdi Mohan N, M.S.A., M.Litt.
19800731 201012 1 001

Dilisi oleh Mahasiswa [UGM-SP-FORM1601 UJIAN SKRIPSI] FO-002/FO-008



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Sosio Yusticia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Tlp. (0274) 563362, 542382, Fax. (0274) 563362 Ext. 222
<http://www.fisipol.ugm.ac.id> e-mail: sekdeksp@ugm.ac.id

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANDA DIMAR B
NIM : 20/455792/SP/29381
Tahun terdaftar :
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas/Sekolah : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Yang menyatakan,



ANANDA DIMAR B

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat sehat, dan keberuntungan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Halaman persembahan ini saya jadikan media merekam dan merawat ingatan untuk terus berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

1. Wawan Mas'udi, Ph. D., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM serta Dr. Randy W. Nandyatama, M. Sc Kepala Departemen Hubungan Internasional UGM;
2. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, MA., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, dan tenaga dalam proses penyusunan skripsi;
3. Dr. Randy Wirasta Nandyatama, M. Sc dan Dr. Rochdi Mohan Nazala, M.S.A., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang konstruktif serta substantif dalam penulisan skripsi;
4. Orang tua saya Bapak Sumarsono dan Ibu Agnes Dina Krischahayarini, yang memberikan semangat, doa, dan bimbingan yang dilakukan setiap waktu;
5. Kakak saya, Krisna Bayu Kiswara, yang selalu memberi dukungan dan menjadi contoh baik dalam setiap pilihan hidup;
6. Stefani Gemma Galgani Maylinda Caesara Ardhea Pramesti, satu perempuan istimewa selain ibu saya yang tidak kenal lelah menemani dalam setiap pembelajaran hidup selama empat setengah tahun ke belakang;
7. Sahabat saya Rama Ardha, Aldi Haydar, Faiz Aflaha, Raihan Ramadhan, Widhi Hanantyo, Satria Firhansyah, Muhammad Pradana, Aura Zahwa, Masako Septianingrum, Nadia Aulia, Mauliy Nurfalaha, Anggita Fitri, Elisabeth Vania, Oki Afana. Darline Lanek yang membersamai perjalanan saya selama ini;
8. Guru-guru saya yang sudah membimbing dan mengantarkan saya ke titik ini;
9. Almamater Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, maka dari itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 02 Februari 2024

Ananda Dimar Bagaskara

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	3
1.3 Metodologi	3
1.3.1 Tinjauan Literatur	3
1.3.2 Kerangka Konseptual	5
1.4 Argumen Utama	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II	12
DIPLOMASI MASKER DAN DIPLOMASI VAKSIN SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM KERANGKA NEOCLASSICAL REALISM	12
2.1 Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin Cina yang Strategis dalam Krisis Kesehatan Global COVID-19	12
2.1.1 Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin sebagai Peluang Cina menjadi Leader in Global Health	13
2.1.2 Pertumbuhan Industri Alat Medis Cina sebagai Penopang Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin	14
2.2 Perkembangan Kebijakan Luar Negeri Cina Dalam Merespon Krisis Kesehatan Global di Abad ke-21	16
2.2.1 Diplomasi Kesehatan Cina Ketika SARS dan Konstruksi Citra Internasional Cina	16
2.2.2 Penyempurnaan Kerangka Kebijakan Luar Negeri Cina dalam Aspek Kesehatan: Health Silk Road	17
BAB III	19
APLIKASI NEOCLASSICAL REALISM DALAM DIPLOMASI MASKER DAN DIPLOMASI VAKSIN CINA	19
3.1. Variabel Independen: Tekanan Sistemik Eksternal yang Dipersepsikan oleh Para Pemimpin dan Elite Cina	20
3.2 Variabel Intervensi dalam Kemunculan Kebijakan Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin	22
3.2.1 Leader Images: Persepsi Elit Kebijakan Cina dalam	



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**Strategi Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin Cina dalam Krisis Kesehatan Global COVID-19:
Sebuah**

Pendekatan Neoclassical Realism

ANANDA DIMAR BAGASKARA, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Krisis COVID-19	22
3.2.2 Fundamental Budaya Strategis Tianxia dan Hehe dalam Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin	25
3.2.3 Dinamika dan Keterlibatan Institusi Domestik dalam Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin	27
3.2.4 Hubungan Masyarakat dan Negara Cina selama Krisis COVID-19	29
3.3 Variabel Dependen: Tiga Fase Interaksi Antarvariabel Unit dalam Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin	32
BAB IV	35
KESIMPULAN	35
DAFTAR PUSTAKA	37

DAFTAR SINGKATAN

BRI	<i>Belt and Road Initiative</i>
CH30	<i>China Health 2030</i>
CMDIG	<i>China Medical Device Industry Group</i>
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
FPE	<i>Foreign Policy Executive</i>
HSR	<i>Health Silk Road</i>
KPULNP	Komisi Pimpinan Urusan Luar Negeri Pusat
PKC	Partai Komunis Cina
PLA	<i>People Liberation Army</i>
SARS	<i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
WHO	<i>World Health Organisation</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema diplomasi masker dan diplomasi vaksin
dalam *neoclassical realism*

19

**STRATEGI DIPLOMASI MASKER DAN DIPLOMASI VAKSIN CINA
DALAM KRISIS KESEHATAN GLOBAL COVID-19:
SEBUAH PENDEKATAN *NEOCLASSICAL REALISM***

**Ananda Dimar Bagaskara
20/455792/SP/29381**

ABSTRAK

Krisis kesehatan dunia COVID-19 tahun 2020 mendorong Cina sebagai *great power* harus menghadirkan solusi global dalam bentuk kebijakan luar negeri diplomasi masker dan diplomasi vaksin. Diplomasi tersebut memberikan keuntungan strategis kepada Cina utamanya perbaikan citra dan perluasan pengaruh dalam tatanan internasional. Penelitian ini berusaha menganalisis dinamika kemunculan diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina melalui kerangka *neoclassical realism* dengan menggunakan *intervening variables*. Oleh sebab itu, penelitian ini berargumen bahwa proses perumusan diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina dipengaruhi oleh empat *intervening variables*, yaitu *leader image*, *state society relation*, *domestic institution*, dan *strategic culture*. Penggunaan variabel tersebut memungkinkan analisis diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina menjadi komprehensif dengan mengakomodasi faktor di tingkat domestik dan internasional. Penelitian ini juga berusaha memberikan alternatif analisis mengenai hubungan internasional Cina yang kerap mengesampingkan variabel domestik dalam penentuan sebuah kebijakan luar negeri Cina. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Cina tidak hanya selalu diasosiasikan pada pengaruh personal Xi Jinping maupun dinamika distribusi *relative power* global.

Kata kunci: Diplomasi masker; diplomasi vaksin; *neoclassical realism*; Cina; Xi Jinping

ABSTRACT

The global health crisis of COVID-19 in 2020 prompted China as a great power to present global solutions in the form of foreign policy through mask diplomacy and vaccine diplomacy. This diplomacy provided strategic advantages to China, particularly in improving its image and expanding influence in the international order. This research aims to analyze the dynamics of China's emergence in mask diplomacy and vaccine diplomacy through the neoclassical realism framework using intervening variables. Therefore, this study argues that the formulation process of China's mask diplomacy and vaccine diplomacy is influenced by four intervening variables: leader image, state-society relations, domestic institutions, and strategic culture. The use of these variables allows for a comprehensive analysis of China's mask diplomacy and vaccine diplomacy by accommodating domestic and international factors. This research also seeks to provide an alternative analysis of China's international relations that often overlooks domestic variables in determining Chinese foreign policy. Thus, China's foreign policy is not always associated with the personal influence of Xi Jinping or the dynamics of global relative power distribution.

Keywords: Mask diplomacy; vaccine diplomacy; *neoclassical realism*; China; Xi Jinping

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina dalam mengatasi krisis kesehatan global COVID-19 melalui pendekatan *neoclassical realism*. Pemilihan topik didasarkan pada meningkatnya permasalahan penyakit global sehingga negara harus mampu beradaptasi melalui diplomasi kesehatan. Fokus penelitian berusaha untuk memahami proses perumusan kebijakan hingga implementasi diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina. Signifikansi lainnya yaitu diplomasi masker dan diplomasi vaksin dinilai berhasil memperluas pengaruh Cina dan menjawab skeptisisme internasional terhadap pemerintahan Xi Jinping (Lee, 2021). Pendekatan *neoclassical realism* digunakan untuk menganalisis konstruksi diplomasi dengan mempertimbangkan aspek politik di tingkat domestik dan internasional. Pendekatan ini memberikan analisis komprehensif dan alternatif terkait kebijakan luar negeri Cina yang didominasi pendekatan neorealis (Fravel, 2020; Sørensen, 2013; Khoo, 2020).

Diplomasi masker dan diplomasi vaksin merupakan salah satu dari banyak bentuk diplomasi di bidang kesehatan global. Shakeel (2019) mendefinisikan diplomasi kesehatan sebagai upaya distribusi alat medis dan vaksin untuk mencapai tujuan kesehatan global yang beririsan dengan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Diplomasi tersebut merupakan respon Cina dalam mempertahankan pengaruh dan citra internasional yang sempat menurun setelah kemunculan COVID-19 di Wuhan. Secara implisit, pembahasan mengenai diplomasi masker dan diplomasi vaksin erat kaitannya dengan kebijakan politik dan ekonomi Xi Jinping baik dalam negeri maupun luar negeri. Diplomasi tersebut merupakan bagian integral dari proyek BRI (*Belt and Road Initiative*), khususnya *Health Silk Road* (HSR), untuk mempromosikan kerja sama kesehatan yang telah disepakati oleh WHO (*World Health Organisation*) dan 30 negara mitra (Zeng et al., 2023). Dengan kata lain, melalui kedua diplomasi tersebut Xi Jinping memanfaatkan instrumen BRI untuk mewujudkan *Chinese Dream* dan menjaga keberlanjutan kebangkitan Cina (Lee, 2023).

Dalam perkembangannya, Xi Jinping juga terobsesi untuk menjadi *great leader* dari Cina kontemporer yang lebih baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya dengan

berbagai prestasinya (Bucklet, 2017). Misalnya, Deng Xiaoping berkontribusi dalam mendorong reformasi dan liberalisasi ekonomi pada tahun 1980-an yang berimplikasi pada *economic miracle* (Xu, 2011). Jiang Zemin mendorong restrukturisasi industri di berbagai sektor sekaligus mengupayakan stabilitas politik domestik pasca tragedi lapangan Tiananmen (Cunningham, 2022). Sementara itu kepemimpinan Hu Jintao mendorong diplomasi luar negeri yang intensif dan pertumbuhan ekonomi dua digit yang konsisten (Mohanty, 2012).

Sun & Yu (2023) menilai bahwa diplomasi masker dan diplomasi vaksin merupakan keberhasilan Xi Jinping dalam memperluas pengaruh dan mempromosikan Cina sebagai *responsible power*. Dalam perkembangannya, proses perumusan dan implementasi kedua diplomasi tersebut memiliki kompleksitas yang menarik untuk dianalisis. Berkembangnya globalisasi menjadikan penyebaran penyakit dan virus sulit ditangani. Selain itu, muncul berbagai tekanan internasional melalui pernyataan pejabat publik negara maupun pembahasan di media sosial kepada Cina sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam krisis kesehatan global COVID-19 (Pietrzak-Franger et al., 2022). Tekanan tersebut misalnya dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain itu, permasalahan domestik Cina seperti penurunan pertumbuhan ekonomi hingga meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap respons Xi dalam mengatasi pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pemilihan kebijakan luar negeri Cina. Serangkaian peristiwa tersebut membuat Xi cukup kewalahan di awal kasus COVID-19 sehingga cenderung bersikap defensif dan menunjukkan *bunker mentality*.¹ Xi dan Cina menutup diri dari interaksi internasional sehingga tidak transparan mengenai perkembangan virus COVID-19 (Ran & Jian, 2021).

Pada akhirnya, Xi dan Partai Komunis Cina (PKC) mampu mengalokasikan sumber daya politik dan ekonomi nasional untuk merespons krisis kesehatan global COVID-19. Krisis tersebut berhasil ditransformasikan menjadi peluang politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks diplomasi masker dan diplomasi vaksin, respon cepat dan tepat sangat diperlukan guna menjaga kepemimpinan dan kekuasaan PKC sebagai modal legitimasi politik dari masyarakat domestik (Zhang, 2023). Legitimasi hanya dapat dipenuhi jika Xi mampu menunjukkan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi, di antaranya menekan penyebaran kasus COVID-19 dan penyediaan tenaga kesehatan maupun alat medis untuk keperluan dalam negeri maupun

¹ Sikap defensif ketika diserang atau dikritik secara tidak adil, memicu respons kuat untuk melindungi diri atau kelompok dari persepsi negatif.

luar negeri. Dengan kata lain, jalannya pemerintahan sangat didasarkan pada *performance-based legitimacy*. Logika ini telah menggeser legitimasi berbasis ideologis di era Mao, terutama dengan adanya reformasi ekonomi (Chu, 2013). Selain itu, beberapa konsep *Tian Xia* dan *Chinese Dream* juga memberikan pengaruh tersendiri terhadap munculnya diplomasi masker dan vaksin Cina.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa perumusan dan implementasi diplomasi masker dan diplomasi vaksin dipengaruhi oleh faktor-faktor *intervening variables*.² Baik perkembangan domestik maupun internasional selalu memberikan konteks utama terhadap kebijakan luar negeri maupun keamanan Cina. Pada masa krisis kesehatan global COVID-19, Xi telah mengalami berbagai permasalahan ekonomi dan politik yang lebih kompleks daripada pemimpin-pemimpin Cina sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan *neoclassical realism* menjadi relevan terutama dengan memasukkan konteks eksternal dan internal negara, sekalipun Cina menganut sistem non-demokrasi (Sørensen, 2013).

1.2 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana *neoclassical realism* menjelaskan kemunculan dan implementasi diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina di tengah krisis kesehatan global COVID-19?

1.3 Metodologi

1.3.1 Tinjauan Literatur

Dalam studi ini, diplomasi masker dan diplomasi vaksin selama krisis kesehatan global COVID-19 merupakan variabel dependen. Variabel tersebut berusaha dipahami menggunakan pendekatan *neoclassical realism* yang merupakan variabel independen. Dalam diplomasi masker dan diplomasi vaksin untuk merespon krisis kesehatan COVID-19, Cina menunjukkan perilaku anomali dalam interaksi internasionalnya. Kemunculan tekanan internasional terhadap Cina utamanya dari Amerika Serikat mengenai episentrum COVID-19 membuat Xi cenderung bersikap defensif dan tertutup sehingga menolak berbagai upaya kerja sama dengan WHO (Ran & Jian, 2021). Xi juga mendapat tekanan lainnya dengan tuduhan menyembunyikan, merekayasa, dan

² Variabel yang terletak di antara variabel independen dan variabel dependen untuk menjelaskan proses atau mekanisme yang mendasari cara variabel independen memengaruhi variabel dependen.

mengabaikan COVID-19, sehingga penanganan menjadi terlambat. Meskipun demikian, pada pertengahan tahun 2020, Xi dan Cina justru semakin terbuka terhadap kerja sama serta agresif melakukan diplomasi masker dan diplomasi vaksin sebagai upaya mengukuhkan kepemimpinan globalnya (Sun & Yu, 2022). Hal tersebut tidak terlepas dari adanya *intervening variables* yang akan dijelaskan berdasarkan pengalaman Cina melalui tinjauan literatur.

Camilla Sorensen (2013) menjelaskan penerapan *neoclassical realism* dalam memahami kebijakan luar negeri Cina. Sorensen (2013) menilai hubungan internasional Cina dalam kepemimpinan Hu Jintao dan masa awal Xi menunjukkan Cina belum siap mengambil peran sebagai *great power*. Hal tersebut tidak terlepas dari munculnya berbagai tantangan politik internasional maupun domestik. Oleh sebab itu, penulis berusaha untuk mengaplikasikan metode penelitian yang serupa, namun dalam periode waktu dan variabel yang berbeda. Selain itu, Sorensen (2013), Basrur & Kliem (2021), serta Alhammadi (2022) cenderung hanya berfokus pada institusi domestik alih-alih mengaplikasikan keseluruhan *intervening variables* yang secara komprehensif mempengaruhi perilaku Cina.

Dalam perkembangannya, perilaku suatu negara seringkali terhambat oleh berbagai tantangan ekonomi dan politik di lingkungan domestik. Dalam artian, terdapat ketidakmampuan para FPE (*Foreign Policy Executive*) untuk merespons dan mobilisasi sumber daya nasional karena kurangnya informasi serta data mengenai sebuah krisis (Taliaferro, 2010). Cina kesulitan memperoleh informasi lengkap mengenai COVID-19 dan menjadi pengalaman pertama kalinya bagi Xi sehingga permasalahan COVID-19 menjadi semakin kompleks (Bickley et al., 2020). Cina juga tampak gagap dalam menyediakan fasilitas kesehatan karena bidang kesehatan tidak menjadi prioritas pemerintahan Xi maupun pemerintahan sebelumnya (Yang, 2019; Meng, 2022; Sun et al., 2021). Hal tersebut cukup kentara dengan kurang sigapnya fasilitas kesehatan rumah sakit untuk menampung banyaknya pasien terinfeksi COVID-19.

Kegagalan dalam respons cepat dan mobilisasi sumber daya kesehatan nasional tersebut merupakan hambatan aktualisasi kebijakan luar negeri suatu negara. Hal tersebut diantaranya karena faktor kompleksitas kontestasi kepentingan domestik dalam pengambilan kebijakan yang merupakan bentuk *state-society relations* (Dueck, 2010). Secara eksplisit, argumen tersebut sebenarnya kurang relevan diaplikasikan dalam konteks Cina yang dinilai sebagai negara non-demokrasi. Meskipun demikian, dalam tulisan Taisu Zhang (2023) pada praktiknya di Cina terjadi demokrasi secara implisit

yang melibatkan tawar-menawar politik antara rakyat dan pemerintah. Rakyat cenderung menerima pemerintahan otoriter dengan imbalan peningkatan standar hidup melalui kinerja ekonomi yang baik. Dengan kata lain, Xi membutuhkan legitimasi politik yang didasarkan pada performa dan kinerja positif, namun dalam krisis kesehatan global COVID-19 terjadi berbagai permasalahan. Oleh sebab itu, Xi berusaha menyelesaikan permasalahan COVID-19 sebagai upaya mempertahankan legitimasi kekuasaannya sekaligus peluang memperkuat peran Cina sebagai *great power* (Kyte, 2020).

Sejumlah literatur di atas telah membantu dalam mengkonstruksi hipotesis dan analisis penelitian ini. Steven Lobell, et. al. (2010) berkontribusi pada pemberian instrumen dan variabel penelitian yang lebih spesifik dan komprehensif. Dalam buku *Neoclassical realism, the state, and foreign policy* terdapat berbagai contoh dan cara analisis terhadap suatu fenomena internasional yang dilihat dalam *neoclassical realism*. Penelitian ini juga berbeda dari penelitian lainnya, terutama penggunaan variabel waktu krisis kesehatan global COVID-19 dan keseluruhan *intervening variables* dalam mengkonstruksi diplomasi masker dan diplomasi vaksin.

1.3.2 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan pendekatan *neoclassical realism* sebagai kerangka konseptual yang digagas oleh Gideon Rose. Pendekatan ini merupakan sebuah instrumen analisis politik luar negeri yang berusaha menggabungkan realisme klasik dan neorealisme. Kemunculan *neoclassical realism* tidak terlepas dari perdebatan antara dominasi neorealis dan para pengkritiknya selama empat dekade terakhir. Pendekatan ini mampu menjelaskan perilaku anomali Cina dalam diplomasi masker dan diplomasi vaksin pada krisis kesehatan global COVID-19. Terdapat beberapa variabel yang mengintervensi pilihan kebijakan luar negeri sebagaimana asumsi dalam *neoclassical realism*.

Rose (1998) merumuskan *neoclassical realism* sebagai alat analisis politik luar negeri dengan mengambil beberapa asumsi dasar dari neorealisme. Ia berargumen bahwa perilaku suatu negara seringkali didorong oleh *relative material power* dalam sistem internasional. Meskipun demikian, *relative power* tidak selalu inheren dengan perilaku negara dalam hubungan internasional. Perilaku tersebut terjadi karena adanya *intervening unit-level variables* yang mentranslasikan tekanan sistemik suatu negara. *Intervening variables* tersebut adalah *state-society relations*, *domestic institution*, *strategic culture*, dan *leader perception* (Ripsman et al., 2016).

Meskipun *neoclassical realism* dinilai sebagai perbaikan dari neorealis dengan mengakomodasi *two level game analysis*, pendekatan ini juga memperoleh beberapa kritik terutama dalam identifikasi ontologi dan epistemologinya. Peran persepsi intersubjektif dan interpretivis para FPE (*Foreign Policy Executive*) dinilai kontraproduktif dengan *neoclassical realism* sebagai teori positivis. Meskipun demikian, *neoclassical realism* tidak terlalu memperhatikan aspek tersebut selama kegunaan secara praktis dapat diaplikasikan (Smith, 2018). *Neoclassical realism* bersepakat dengan realisme struktural bahwa negara bertindak sebagai respons terhadap ancaman dan peluang internasional. Meskipun demikian, *neoclassical realism* menolak preskripsi teori *balance of power*. *Neoclassical realism* memiliki ontologi di tengah antara materialisme dan idealisme serta rasionalisme dan konstruktivisme.

Ripsman (2016) berpendapat bahwa *neoclassical realism* menggunakan positivisme sebagai instrumen untuk meneliti kasus dan menguji teori. Meskipun demikian, *neoclassical realism* menganut epistemologi “positivis lunak” untuk mengakomodasi aspek intersubjektif. Metodologi dalam *Neoclassical realism* cukup fleksibel dengan menggunakan *process tracing* dan studi kasus untuk mengevaluasi sebab akibat antarvariabel independen, intervening, dan dependen. Ripsman (2016) kemudian menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor “misterius” dalam kebijakan luar negeri. Oleh sebab itu, *neoclassical realism* berupaya membuka “kotak hitam” untuk mengungkap variabel domestik yang memengaruhi perilaku negara.

Neoclassical realism memiliki tiga variasi. Mereka adalah tipe I Snyder dan Schweller yang berfokus pada analisis lingkungan eksternal, tipe II Wohlforth, Dueck, dan Brawley yang cenderung berfokus pada lingkungan domestik, serta tipe III yang menganalisis hasil kebijakan luar negeri secara berimbang dengan merujuk pada faktor-faktor domestik dan internasional (Ripsman, 2016). Penelitian ini menggunakan tipe III untuk memperluas kemampuan penjelasan *neoclassical realism* dari cakupan pilihan kebijakan luar negeri jangka pendek ke arah yang lebih panjang dan hasil yang lebih komprehensif.

Neoclassical realism tipe III menganggap “rangangan sistemik” sebagai variabel independen dan menjadi premis logika kausalitas. Variabel independen juga meliputi perubahan distribusi kekuasaan relatif antarunit negara. Meskipun demikian, insentif dari variabel independen tidak secara otomatis menghasilkan perubahan kebijakan luar negeri. Hal tersebut melalui proses internal yang kompleks dan dipengaruhi oleh empat variabel tingkat unit. Pertama, konsep “*leader image*” mencakup para FPE yang terdiri

dari presiden, perdana menteri, dan penasehat yang berperan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri (Ripsman, 2016). FPE harus mampu membaca dan merespons stimulus sistem internasional dengan tepat. *Leader image* memiliki signifikansi besar dalam menilai bagaimana kebijakan luar negeri diinterpretasikan sebagai ancaman atau peluang. Pemikiran FPE dipengaruhi oleh aksi kumulatif dari berbagai aktor seperti pembuat kebijakan, pelobi, kelompok masyarakat, dan kelompok bisnis (Dapur, 2010).

Kedua, budaya strategis merujuk pada kumpulan norma sosial, asumsi, kebiasaan berpikir, tradisi, dan metode operasional yang terbentuk dan dipertahankan dalam suatu masyarakat (Gray, 1999). Budaya strategis membentuk pola kebijakan luar negeri melalui struktur perantara yang membimbing respons negara terhadap rangsangan eksternal maupun internal (Basrur, 2001). Konsepsi yang tertanam dalam pemahaman bersama tersebut meliputi keyakinan, pandangan dunia, dan preferensi budaya yang dapat mempengaruhi intervensi para pemimpin dan institusi (Ripsman, 2016). Dengan demikian, para FPE akan berusaha mewujudkan dan memanifestasikan nilai budaya tersebut ke dalam kebijakan dan keputusan yang melibatkan masyarakat negara tersebut.

Ketiga, institusi domestik mengacu pada pengaturan rezim negara dan struktur politik seperti dinamika hubungan antarlembaga. Institusi tersebut memberikan wawasan tentang siapa yang berperan dalam perumusan kebijakan dan penunjukan pejabat kunci atas kebijakan luar negeri. Lebih lanjut, institusi domestik membentuk dinamika kebijakan luar negeri suatu negara dengan cara mengatur interaksi, koordinasi, dan memengaruhi preferensi pemangku kepentingan (Ripsman, 2016). Keempat, hubungan negara-masyarakat merujuk pada interaksi antara pemerintah dan masyarakat sipil. *Neoclassical realism* menekankan bahwa hubungan negara-masyarakat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mobilisasi, dan pemanfaatan kekuatan negara yang memengaruhi kebijakan luar negeri (Ripsman, 2016). *Neoclassical realism* berusaha memandang negara sebagai rantai sebab-akibat dari pengaruh *intervening variables* yang dapat mengungkap mekanisme pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

Keempat *intervening variables* di atas akan melalui tiga proses di lingkungan domestik, yaitu pembentukan persepsi, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Pembentukan persepsi tidak hanya dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor-faktor internasional, tetapi juga oleh citra pemimpin dan budaya strategis. Sementara itu, proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dikondisikan oleh faktor-faktor budaya strategis, hubungan antara negara dan masyarakat, serta institusi domestik. Dengan demikian, *intervening variables* menjadi pintu yang

memungkinkan analisis kompleks mengenai interaksi antara faktor-faktor domestik dan internasional dalam kebijakan luar negeri.

Diplomasi masker dan vaksin menunjukkan dengan komprehensif bagaimana FPE Cina dipengaruhi oleh empat *intervening variables*. Tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa, membentuk persepsi FPE Cina untuk berperilaku defensif, terutama ketika informasi mengenai krisis COVID-19 sangat terbatas (Wu, 2021). Setelah Xi Jinping mampu mengelola krisis dengan berbagai instrumen dan kebijakan, maka perilaku Cina berubah menjadi kooperatif. Perilaku ini unik, terutama ketika tekanan internasional masih tinggi, negara-negara semakin tertutup, dan hanya mementingkan keselamatannya (Sun & Yu, 2023). Cina menunjukkan sikap sebagai *responsible great power* melalui diplomasi masker dan diplomasi vaksin hanya dalam waktu tidak lebih dari 5 bulan pasca kemunculan COVID-19 pertama (Liu et al., 2022).

Jika hanya melihat pada sistem internasional maupun distribusi *relative power* suatu negara, maka tindakan Cina yang mendadak kooperatif dalam krisis COVID-19 dinilai anomali (Smith & Fallon, 2020). Pasalnya, dengan munculnya krisis kesehatan dan ditutupnya perbatasan antarnegara membuat negara mengaktifkan perilaku *self help* sehingga kerja sama semakin berkurang. Negara-negara akan cenderung menyimpan sumber daya nasional mereka untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Tetapi, lain halnya dengan Cina yang justru mendistribusikan cukup banyak alat dan tenaga medis ke berbagai negara. Bahkan, Cina juga menawarkan bantuan melalui diplomasi kepada negara-negara Eropa yang menuding Cina sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap krisis kesehatan global COVID-19 (Kobierecka, 2022).

Perilaku anomali Cina di atas dapat dipahami karena adanya *intervening unit variables*. Xi Jinping sebagai *leader* dalam FPE mempunyai persepsi bahwa krisis COVID-19 merupakan sebuah tantangan bagi legitimasinya, baik secara domestik maupun internasional. Krisis kesehatan dunia merupakan permasalahan baru yang belum pernah dialami oleh Xi, sehingga segala kebijakan yang ia ambil berisiko besar. Dalam konteks ini, Xi memilih menjadi pemimpin yang *risk averse* alih-alih *risk taker* karena proyeksi krisis tersebut belum jelas (Lobell et al., 2010). *Risk averse* merujuk pada Xi yang berusaha menghindari risiko dengan meminimalisir kemunculan dan komentar di publik. Selain itu, Xi memilih untuk defensif karena adanya politisasi dan *scapegoating* dari masyarakat internasional. Kemudian, ketika Xi sudah memperoleh cukup informasi, maka ia mengubah perilakunya menjadi kooperatif.

Dalam konteks *state-society relations*, Xi Jinping membutuhkan legitimasi dari masyarakat Cina untuk berkuasa lebih lama. Meskipun Cina merupakan negara non-demokrasi, tetapi dalam praktiknya terjadi tawar-menawar politik secara implisit antara rakyat dan pemerintahan di mana legitimasi partai dan Xi didasarkan pada keberhasilan dalam mengelola krisis. Namun, krisis COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan dan muncul ketidakpuasan dari publik. Dengan demikian, pada awalnya Xi Jinping harus menginvestasikan banyak sumber daya politik untuk urusan domestik karena tidak lagi dapat mengandalkan kinerja ekonomi sebagai sumber utama legitimasi politik (Zhang, 2023). Setelah semua terkelola, Xi melancarkan diplomasi masker dan diplomasi vaksin sebagai bentuk proyeksi agresif memperluas pengaruh di tengah krisis kesehatan global COVID-19.

Selanjutnya yaitu justifikasi penggunaan *neoclassical realism* karena teori hubungan internasional Cina jarang muncul untuk menjelaskan fenomena hubungan internasional sejak hadirnya negara bangsa pada abad ke-17. Hal tersebut erat kaitannya dengan permasalahan struktural, terutama dominasi produksi pengetahuan oleh negara Eropa. Li Wei (2007) menjelaskan juga bahwa banyak pemikir Cina terjebak dalam upaya tekstualisasi teori dari Eropa sehingga melupakan pemikiran Cina. Bahkan, pemikir Cina juga sering terjebak dalam stigma pengetahuan negara Selatan sebagai tidak empirik dan tidak rasional.

Dalam perkembangannya, para akademisi Cina juga lebih memprioritaskan aspek praktis dalam analisis kebijakan daripada konstruksi teori. Hal tersebut berimplikasi pada minimnya kehadiran kerangka teori Cina yang memadai untuk kebijakan luar negeri Cina. Selain itu, proses konstruksi teori Cina juga memiliki kekurangan, di antaranya pendefinisian masalah yang tidak spesifik, penalaran kausal yang lemah, dan kurangnya pengalaman empiris (Qin, 2007). Oleh karena itu, penulis mempertimbangkan teori Barat sebagai prasyarat untuk memvalidasi aplikasi *neoclassical realism* dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan pengalaman politik kebudayaan Cina ke dalam teori hubungan internasional Barat (Qin, 2011).

1.4 Argumen Utama

Menurut pendekatan *neoclassical realism*, proses perumusan dan implementasi diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina dipengaruhi oleh empat *intervening variables*, yaitu *leader image*, *state society relation*, *domestic institution*, dan *strategic culture*. Lebih lanjut, Xi Jinping, sebagai subjek perumus dan implementasi kebijakan luar negeri Cina, berperilaku berdasarkan persepsi yang dibangun hasil dari stimulus

internasional. Persepsi tersebut kemudian diproses ke dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh keempat *intervening variables*.

Dalam konteks diplomasi masker dan diplomasi vaksin, *leader image* erat kaitannya dengan karakteristik kepemimpinan Xi Jinping yang dipengaruhi berbagai ide dan pengalaman hidupnya. Xi Jinping sebagai *leader* dalam FPE mempersepsikan bahwa diplomasi masker dan diplomasi vaksin sangat menguntungkan, terutama dalam melawan narasi negatif negara utara terhadap Cina dan mengukuhkan peran sebagai *responsible great power*. Hal tersebut juga didukung oleh PKC dan instrumen negara lainnya sebagai institusi domestik sehingga perumusan dan implementasi dapat diwujudkan. *Chinese Dream* dan konsep Tian Xia sebagai *strategic culture* yang termanifestasikan dalam BRI dan HSR juga berpengaruh dalam perumusan diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina. Terakhir, *state-society relation* di Cina yang cenderung stabil pasca penanganan gelombang pertama dan kedua COVID-19 membuat kedua diplomasi tersebut dapat terlaksana.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data empiris. Data kualitatif yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari telaah pustaka, seperti buku, dokumen, artikel jurnal, dan surat kabar. Pertama, peneliti melakukan pendefinisian variabel-variabel penelitian melalui reviu literatur sehingga membatasi lingkup penelitian dan lebih terfokus. Variabel-variabel tersebut di antaranya diplomasi masker dan diplomasi vaksin, krisis kesehatan global COVID-19, dan *neoclassical realism*. Selanjutnya, peneliti melakukan proses *tracing* untuk menemukan memvalidasi masing-masing *intervening variables* yang ditemukan dalam perumusan dan implementasi diplomasi masker dan diplomasi vaksin.

Peneliti juga berusaha mengonfirmasi hubungan kausalitas antara *intervening variables* dalam *neoclassical realism* dengan diplomasi masker dan diplomasi vaksin melalui serangkaian mekanisme yang terjadi dalam dinamika politik luar negeri maupun domestik Cina. Proses konfirmasi kausalitas *intervening variables* tersebut dilakukan berdasarkan data yang diambil dari studi pustaka dan laporan mengenai dinamika politik luar negeri maupun domestik Cina 2019-2022. Meskipun demikian, peneliti juga akan menggunakan data dari tahun-tahun sebelumnya, terutama Cina di bawah kepemimpinan Xi Jinping.



1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Setelah Bab Pertama yang berisikan pendahuluan ini, Bab Kedua menguraikan kontekstualisasi dari masing-masing variabel penelitian. Bab ini akan memberikan gambaran mengenai diplomasi masker dan diplomasi vaksin, kebijakan luar negeri Cina dalam merespon krisis kesehatan global di abad ke-21, dan uraian mengenai *neoclassical realism*.

Analisis terkait dengan pertanyaan penelitian akan disampaikan dalam Bab Ketiga terkait dengan analisis *neoclassical realism* dalam pembentukan kebijakan luar negeri diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina. Analisis akan disampaikan berdasarkan masing-masing *intervening variables* yang telah disebutkan. Skripsi akan ditutup dengan Bab Keempat yang berisi kesimpulan dan inferensi yang dapat ditarik dari hasil penelitian.

BAB II

DIPLOMASI MASKER DAN DIPLOMASI VAKSIN SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM KERANGKA *NEOCLASSICAL REALISM*

Diplomasi masker dan diplomasi vaksin merupakan kebijakan luar negeri Cina selama pandemi COVID-19. Kedua kebijakan dilakukan dengan mendistribusikan masker dan vaksin sebagai paket bantuan kemanusiaan kepada negara-negara lain. Kebijakan tersebut diaplikasikan Cina dalam upaya meningkatkan citra internasional dan memperluas pengaruhnya. Cina menyadari bahwa sektor kesehatan merupakan instrumen strategis dalam politik internasional sejak terjadinya SARS³ (Rudolf, 2022). Kemunculan diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina tidak terlepas dari pengaruh faktor domestik dan internasional, sehingga *neoclassical realism* relevan untuk menganalisis topik ini. Oleh karenanya, dalam bab ini penulis memberikan gambaran mengenai diplomasi masker dan diplomasi vaksin, kebijakan luar negeri Cina dalam krisis kesehatan global di abad ke-21, dan uraian mengenai *neoclassical realism*.

2.1 Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin Cina yang Strategis dalam Krisis Kesehatan Global COVID-19

Keputusan Cina mengambil kebijakan diplomasi masker dan vaksin dalam krisis kesehatan global COVID-19 menunjukkan adanya *sense of responsibility*. Meskipun demikian, kebijakan tersebut juga muncul sebagai respons strategis Cina dalam mencapai status sebagai “*leader in global health*” (Lee, 2021). Cina juga diuntungkan dengan situasi internasional seperti absennya negara *great power* dalam memimpin penyelesaian krisis COVID-19 misalnya dengan keluarnya Amerika Serikat dari WHO. Selain itu, terdapat rentetan kegagalan mekanisme kerja sama internasional akibat egosentrisme negara-negara dalam mengamankan kepentingan nasionalnya. Kondisi tersebut membuat Cina berusaha memperkuat posisinya dalam tata kelola kesehatan global yang lama didominasi oleh Amerika Serikat.

Hal lainnya yang memengaruhi munculnya diplomasi masker dan diplomasi vaksin yaitu keberhasilan relatif Cina dalam pengendalian awal pandemi. Xi Jinping

³ SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh SARS *coronavirus* dan pertama kali terjadi di Guangdong, Cina, pada akhir tahun 2002. SARS menyebabkan banyak kematian korban jiwa dan kehancuran ekonomi bagi Cina.

memerintahkan untuk melakukan *lockdown*, pembangunan rumah sakit, dan penggunaan data untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Selama bulan Februari 2020, Cina mulai mengonfirmasi keberhasilannya dalam menurunkan angka COVID-19 (Tian et al., 2020). Pada awal April 2020, Cina muncul sebagai satu-satunya negara yang berhasil melawan COVID-19 dan mulai memulihkan kehidupan sosial maupun ekonomi. Industri mulai bergerak kembali, namun dalam pengawasan ketat dan berbagai pengujian masal. Pemerintahan Cina menunjukkan kapasitas yang patut dijadikan percontohan global di mana sejak April hingga Desember 2020 Cina jarang melampaui angka penambahan kasus sebesar seratus (Burki, 2020).

Kemampuan memulihkan diri tersebut membuat Cina dapat segera memperbaiki kondisi ekonomi nasional dan memulai produksi industri alat medis. Hal ini membuka peluang Cina, terutama ketika negara lainnya masih kesulitan mengaktifkan kembali perekonomian untuk memproduksi kebutuhan alat medis. Kemampuan pemerintah Cina juga didukung oleh kapasitas produksi industri alat medis dalam negeri yang masif. Kondisi dan situasi menguntungkan tersebut dimanfaatkan Cina untuk mengejar kepentingan nasional dan internasionalnya, yaitu memperkuat pengaruh di tatanan internasional. Bagian berikutnya akan menjelaskan konteks mengenai kepentingan mewujudkan *leader in global health* dan industri medis Cina yang bertumbuh pesat.

2.1.1 Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin sebagai Peluang Cina menjadi *Leader in Global Health*

COVID-19 menimbulkan kekacauan sekaligus memberikan peluang bagi Cina unjuk diri sebagai *leader in global health*. Cina menghadapi berbagai tekanan akibat penanganan yang salah di masa awal penyebaran COVID-19. Meskipun demikian, Cina berhasil memulihkan kondisi sosial dan ekonomi ketika negara lainnya masih kesulitan menangani COVID-19. Melalui diplomasi masker dan diplomasi vaksin, Cina memperkuat posisinya dalam tata kelola kesehatan global yang telah diinisiasi selama dua dekade terakhir (Huang, 2022). Selain itu, pada tahun 2022 Cina juga telah menyumbang sebanyak 15,3% dari anggaran WHO sebelumnya hanya 1,84% pada tahun 2020 (Chorev, 2022). Kontribusi ini melonjak naik dan mengalahkan Amerika Serikat yang menyumbang 12,3% dari anggaran WHO tahun 2022. Padahal, Amerika Serikat selalu di urutan pertama, bahkan pada awal kemunculan COVID-19 mencatatkan persentase sebesar 16%.

mengubah hambatan menjadi peluang melalui promosi “*China Solution*” oleh PKC. Bagian dari “*China solution*” tersebut adalah inisiatif Cina sebagai pemimpin dunia dalam penyediaan peralatan medis pada pertengahan Maret 2020 (Thomas, 2021). Setelah itu, Cina mulai mengembangkan vaksin dan berjanji akan mendistribusikan kepada negara dengan penghasilan rendah dan menengah (Huang, 2022). Keberhasilan menjadi negara pertama yang keluar dari krisis COVID-19 membuat Cina mampu memproduksi berbagai alat medis dan mendistribusikannya secara global. Pada Maret 2020, Cina mulai memasok 43% masker global, meningkat pesat jika dibanding tahun sebelumnya sebesar 21% (Wang et al., 2020). Angka ini semakin bermakna dalam konteks COVID-19 dan permintaan global yang meningkat. Kondisi ini membuat Cina mampu menegaskan kepemimpinan dalam tata kelola kesehatan global, terutama dalam memasok kebutuhan medis dunia (Huang, 2022).

Tidak hanya pemasok alat medis, Cina juga menjadi pelopor dalam pengembangan vaksin COVID-19. Pada Mei 2020, Presiden Xi dalam forum WHO berjanji akan menjadikan vaksin produksi Cina sebagai barang publik untuk kebaikan bersama (Wee, 2020). Pada Maret 2021, Cina telah memproduksi sepertiga dosis untuk vaksin dunia dan telah mendistribusikan vaksin sebanyak 1,8 miliar dosis kepada 115 negara (Meng et al., 2021). Upaya Cina ini memperoleh respon positif, terutama dalam mengurangi disparitas akses vaksin COVID-19. Dengan demikian, Cina menjadi satu kekuatan baru dalam kepemimpinan kesehatan global dunia yang tidak terlepas dari topangan industri kesehatan domestik, sebagaimana akan disampaikan berikut ini.

2.1.2 Pertumbuhan Industri Alat Medis Cina sebagai Penopang Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin

Krisis COVID-19 membuat permintaan global terhadap alat medis semakin meningkat, namun aspek penawaran dan produksi alat medis dunia justru semakin menurun akibat tutupnya industri alat medis (Bown, 2021). Cina menjadikan kelangkaan alat medis sebagai peluang, terutama dengan tumbuh pesatnya industri alat medis yang dapat beroperasi pada tahap awal kasus COVID-19. Cina mampu menunjukkan status *responsible great power* melalui produksi alat medis untuk memenuhi permintaan global. Kondisi ini juga dimanfaatkan Cina untuk mengembalikan citra internasional yang sempat menurun melalui diplomasi masker dan diplomasi vaksin.

Perkembangan industri alat medis Cina merupakan sebuah proses panjang yang dimulai pada awal abad ke-20. Cina sebelumnya merupakan negara importir besar alat medis dari negara-negara Eropa. Pada tahun 1953 Cina mulai memperhatikan industri alat medis dengan mendirikan pabrik alat medis pertama di Shanghai (Lampton, 1974). Cina juga mulai menginvestasikan pendanaan besar untuk penelitian, pengembangan, dan pelatihan tenaga kerja medis pada tahun 1970-an. Dengan adanya keterbukaan perekonomian Cina, industri alat medis juga mulai memperoleh diversifikasi investasi dari swasta dan asing (Daemmrich, 2013). Pada tahun 2000, Cina mulai melakukan ekspor alat medis ke negara-negara Asia dan Afrika yang dikemas dalam bentuk diplomasi kesehatan. Hingga saat ini, Cina telah menjadi kekuatan besar dalam memproduksi kebutuhan alat medis dunia.

Pertumbuhan industri alat medis juga distimulasi oleh visi kepemimpinan Xi Jinping. *China Health 2030* atau disingkat CH 2030 merupakan visi Xi untuk menjadikan Cina sebagai negara yang sehat secara keseluruhan pada tahun 2030 (Chen et al., 2019). Visi tersebut berkontribusi pada perkembangan industri alat medis melalui peningkatan kapasitas industri kesehatan. Xi berusaha mempromosikan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan sektor kesehatan dengan tujuan meningkatkan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, 95% dari populasi harus memperoleh akses layanan fasilitas kesehatan negara dengan tenaga medis sebesar 3,5 per 1.000 penduduk (Xiao et al., 2021). Strategi ini mendorong munculnya perusahaan produsen alat medis, di antaranya Mindray Bio-Medical Electronics, Philips Medical Systems China, dan GE Healthcare China.

Pemerintah juga membentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di sektor kesehatan, di antaranya Sinopharm, China Medical Bioengineering Corporation, Shanghai Institute of Biological Products, dan Sinomach (Wu & Xu, 2021). Dengan demikian Cina memiliki infrastruktur memadai sehingga mampu melakukan diplomasi masker dan diplomasi vaksin. Cina telah memproduksi sekitar 1,1 miliar masker medis per hari pada tahun 2020 dan meningkat 3,2 miliar masker per hari pada tahun 2021 (Wang et al., 2020). Cina juga telah memproduksi 2,8 miliar dosis vaksin COVID-19 dengan berbagai jenis dan menargetkan produksi 4 miliar dosis pada akhir tahun 2023. Pada akhirnya, produksi masker dan vaksin COVID-19 yang masif membuat Cina mampu berkontribusi signifikan dalam penanganan krisis COVID-19.

2.2 Perkembangan Kebijakan Luar Negeri Cina Dalam Merespon Krisis Kesehatan

Global di Abad ke-21

Kesehatan telah lama menjadi bagian dari kebijakan luar negeri, namun seringkali ditekankan sebagai urusan domestik negara. Perkembangan politik dan epidemiologi global memunculkan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dalam kebijakan luar negeri (Katz et al., 2011). Kesadaran tersebut mengarah pada perubahan pemahaman di kalangan pengambil kebijakan maupun akademisi, yang termanifestasikan melalui munculnya lensa kebijakan luar negeri berbasis kesehatan serta proliferasi program kesehatan global. Negara-negara juga mendorong pembentukan institusi multilateral seperti WHO untuk mengakomodasi isu kesehatan. Dengan demikian, kesehatan dan politik luar negeri memiliki keterkaitan erat hingga saat ini.

Dalam perkembangannya, Cina sebagai negara besar juga memegang posisi penting dalam relasi antara kesehatan dan kebijakan luar negeri. Dengan seperlima populasi dunia dan sepertujuh beban penyakit global, Cina memiliki pengaruh signifikan terhadap isu kesehatan global (Farrer, 2022). Cina dalam catatan sejarah juga memiliki permasalahan wabah penyakit seperti epidemi SARS tahun 2003. Dalam konteks Cina abad ke-21, wabah SARS menunjukkan bahwa penyakit di Cina dapat mempengaruhi stabilitas, kemakmuran, dan keamanan baik skala nasional, regional, maupun global (Thornton, 2009). Dengan demikian, pemimpin Cina pada abad ke-21 harus mampu mengelola isu kesehatan sebagai peluang politik domestik maupun internasional.

2.2.1 Diplomasi Kesehatan Cina Ketika SARS dan Konstruksi Citra Internasional Cina

Kebijakan luar negeri Cina selama SARS tahun 2003 menyoroti potensi ancaman keamanan dan kesehatan. Meskipun SARS hanya berlangsung kurang dari delapan bulan, dampaknya sangat signifikan terhadap perekonomian nasional dan memicu krisis sosial-politik Cina. Perdana Menteri Wen Jiabao kesulitan merumuskan kebijakan akibat krisis SARS, terutama dalam konteks kesehatan dan keamanan masyarakat (Huang, 2010). Krisis ini memicu diskusi tentang hubungan antara penyakit menular, pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial-politik, dan keamanan nasional di kalangan akademisi dan pengambil kebijakan Cina. Akademisi Cina menyelenggarakan konferensi nasional mengenai SARS dan mengusulkan agar keamanan manusia menjadi dasar keamanan nasional Cina (Thornton, 2009).

Penyebaran SARS pada tahun 2003 menguatkan persepsi bahwa Cina merupakan pemain penting dalam sistem internasional. Wen Jiabao menanggapi penyebaran SARS

lintas batas negara dengan menekankan perlunya upaya kerja sama di tingkat regional dan internasional (Zhong & Zeng, 2006). Sebagai bentuk komitmen kerja sama, Cina mengusulkan pembentukan dana khusus untuk melawan SARS dan menyumbang sebesar \$1,2 juta (Huang, 2010). Di Asia Tenggara, Cina terlibat dalam KTT Bangkok dan menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan hubungan ASEAN dengan Cina. Cina juga memanfaatkan dinamika ini dengan memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Oktober 2003, Cina mencapai tonggak sejarah dengan menjadi mitra strategis pertama ASEAN dan menghapus kecurigaan dari sengketa wilayah dan konflik ideologi (George et al., 2021).

SARS memberikan pelajaran kepada Cina bahwa tantangan terkait kesehatan global tidak dapat diatasi secara mandiri di era globalisasi. Oleh karena itu, Cina cenderung berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam hal kesehatan dan membentuk mekanisme pencegahan dan pengendalian penyakit. Krisis SARS mendorong pemerintah Cina mengambil pendekatan yang lebih transparan diantaranya informasi mengenai epidemi penyakit hewan tidak lagi dianggap sebagai rahasia negara (Hung, 2004). Cina semakin memperhatikan opini internasional, mengakui bahwa kegagalan beradaptasi dapat merusak posisi Cina di dunia. Para pemimpin Cina berusaha terlibat langsung dalam diplomasi kesehatan dan memprioritaskan keadaan darurat kesehatan masyarakat. Cina juga semakin berkontribusi aktif dalam menggunakan diplomasi kesehatan untuk memajukan tujuan kebijakan luar negeri (Huang, 2010).

2.2.2 Penyempurnaan Kerangka Kebijakan Luar Negeri Cina dalam Aspek Kesehatan:

Health Silk Road

HSR (*Health Silk Road*) merupakan salah satu komponen BRI Cina. HSR pertama kali disebutkan dalam laporan Komisi Kesehatan Nasional dan diperkenalkan Xi di Uzbekistan tahun 2016. Tahun berikutnya Beijing menandatangani nota kesepahaman dengan WHO untuk memperkuat dukungan inisiatif HSR. Inisiatif ini bukan hanya untuk merevitalisasi kerja sama kesehatan internasional, tetapi juga menegaskan status Cina dalam tata kelola kesehatan global (Lancaster, 2020). Tujuan HSR meliputi investasi, perbaikan, dan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan melalui kolaborasi antara perusahaan Cina, mitra lokal, dan pemerintah setempat (Yuan, 2023). HSR bertujuan meningkatkan kerja sama kesehatan internasional melalui promosi pertukaran pengetahuan pencegahan penyakit dan kebijakan kesehatan masyarakat

HSR juga memperluas kepemimpinan kesehatan global Cina melalui kontribusi finansial, bantuan teknis, dan berpartisipasi dalam forum kesehatan global. Upaya ini mencerminkan komitmen Cina terhadap kerja sama isu kesehatan global. Selain itu, strategi HSR Cina selama wabah Ebola pada tahun 2017 menunjukkan tanggapan yang cepat melampaui banyak negara lainnya (Huang, 2022). Cina juga terlibat dalam tata kelola kesehatan global melalui inovasi kemajuan teknologi dan mempromosikan model pembangunan kesehatan Cina sebagai alternatif terhadap model Barat (Yuan, 2023). Dalam konteks COVID-19, HSR termanifestasikan melalui diplomasi masker dan diplomasi vaksin terhadap negara-negara mitra. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur jalur distribusi yang telah dikembangkan dalam BRI.

Dalam perkembangannya, publik memandang HSR dengan skeptis, terutama narasi mengenai “jebakan hutang” yang berkaitan dengan investasi infrastruktur kesehatan. Investasi HSR sering kali didukung oleh pinjaman bank dalam negeri Cina. Pendekatan pendanaan ini memunculkan keprihatinan tentang keberlanjutan utang di negara-negara mitra (Yuan, 2023). Tingkat utang yang tidak dapat dipertahankan dapat menyebabkan instabilitas ekonomi, kendala fiskal, dan pembatasan kebijakan bagi negara-negara mitra. Selain itu juga ada kekhawatiran mengenai transparansi dan tata kelola, terutama munculnya intervensi dalam negeri di negara-negara mitra HSR (Zeng et al., 2023).

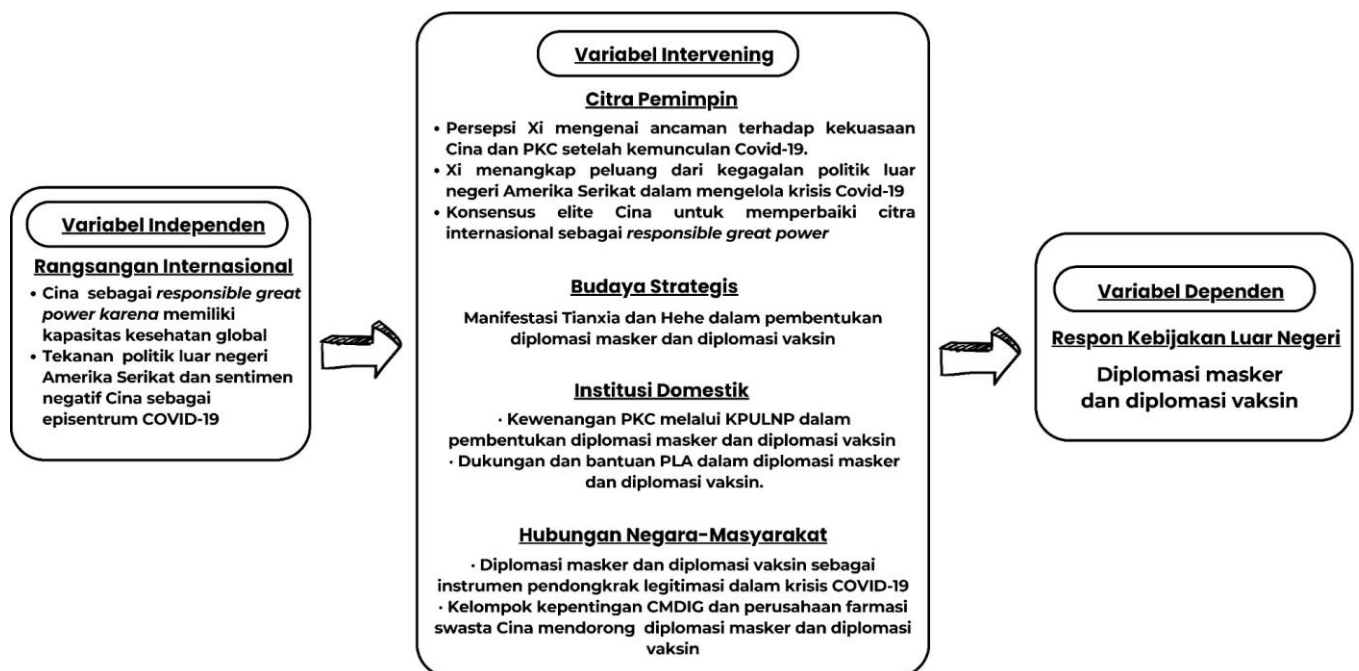
Keseluruhan dinamika perkembangan kebijakan luar negeri Cina dalam merespon krisis kesehatan global di Abad ke-21 tidak terlepas dari analisis dalam pendekatan hubungan internasional. Terdapat negara yang berusaha terlibat penanganan krisis kesehatan untuk mengakumulasi *relative power* sebagaimana neorealisme. Negara juga ikut menyelesaikan krisis kesehatan global karena dorongan kerjasama dan institusi sebagaimana liberalisme. Terkadang, negara juga mempertimbangkan norma dan identitas sebagaimana dalam konstruktivisme. Dalam konteks krisis COVID-19, *neoclassical realism* menjadi pendekatan yang relevan untuk digunakan menganalisis kebijakan luar negeri Cina. Dalam kerangka *neoclassical realism*, penggunaan diplomasi masker dan diplomasi vaksin menggambarkan adanya *intervening variables* yang mempengaruhi pemilihan kebijakan luar negeri Cina. Mekanisme dan skema dari *neoclassical realism* dalam diplomasi masker dan diplomasi vaksin akan dijelaskan pada bab berikutnya.

BAB III

APLIKASI *NEOCLASSICAL REALISM* DALAM DIPLOMASI MASKER DAN DIPLOMASI VAKSIN CINA

Diplomasi masker dan diplomasi vaksin merupakan upaya distribusi alat medis dan vaksin untuk mencapai tujuan kesehatan global yang beririsan dengan kebijakan luar negeri (Shakeel, 2019). Hal tersebut dilakukan Cina dalam krisis COVID-19 kepada Jepang pada Februari 2020 dengan mengirimkan paket bantuan masker. Jepang kehabisan persediaan masker, sementara kasus COVID-19 meningkat sangat drastis. Cina juga merespon krisis dengan mengembangkan vaksin COVID-19 yang kemudian didistribusikan dalam kerangka diplomasi vaksin (Wee, 2020). Keputusan mendistribusikan masker dan vaksin tersebut dimulai dan dipengaruhi oleh faktor eksternal tekanan internasional mengenai tanggung jawab Cina terhadap kemunculan dan penyebaran COVID-19.

Gambar 3.1 Skema diplomasi masker dan diplomasi vaksin dalam *neoclassical realism*



Gambar diatas merupakan keseluruhan mekanisme diplomasi masker dan diplomasi vaksin yang akan dielaborasi dalam analisis sub bab selanjutnya. Skema tersebut menggunakan model *neoclassical realism* tipe III dan berfokus pada mekanisme kekuatan penggerak di balik kebijakan luar negeri diplomasi masker dan diplomasi vaksin. Selain itu, terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana empat kelompok variabel intervensi mempengaruhi keputusan akhir melalui proses-proses konstruksi persepsi, perumusan

kebijakan, dan implementasi. Bab ini akan dimulai dari analisis diplomasi masker dan diplomasi vaksin dengan variabel independen, yaitu stimulus sistem internasional, untuk dilanjutkan dengan analisis empat *intervening variables*.

3.1. Variabel Independen: Tekanan Sistemik Eksternal yang Dipersepsikan oleh Para Pemimpin dan Elite Cina

Struktur internasional multipolar abad ke-21 memungkinkan setiap negara adidaya menanamkan pengaruhnya, termasuk Cina. Tidak hanya dalam sektor perekonomian maupun militer, Cina memiliki kapasitas dalam kepemimpinan sektor kesehatan dunia (Chorev, 2022). Perilaku tersebut ditopang oleh berkembangnya perekonomian Cina dan munculnya persepsi elite bahwa sektor kesehatan merupakan sektor strategis (Li & Wang, 2021). Dalam perkembangannya, Cina telah terlibat dalam beberapa inisiatif penyelesaian krisis kesehatan SARS, Ebola, dan HIV/AIDS (Thornton, 2009). Berbagai kondisi faktual tersebut memunculkan tekanan bagi Cina untuk juga berpartisipasi aktif menyelesaikan krisis COVID-19 dan berperan sebagai pemimpin dalam tata kelola kesehatan global.

Tekanan internasional Cina juga semakin besar terutama setelah terkonfirmasi bahwa Cina merupakan pusat episentrum kemunculan dan penyebaran COVID-19. Negara-negara mulai menutup diri dan kontak internasional dengan Cina terutama dalam sektor perdagangan maupun mobilisasi manusia. Selain itu, terdapat penguatan sentimen dan narasi negatif mengenai Cina dan COVID-19 diantaranya menurunnya citra dan kredibilitas Cina dalam politik luar negeri dalam sekejap. Hal tersebut menyebabkan implikasi krisis lainnya diantaranya hancurnya perekonomian Cina dan dunia, serta meningkatnya gelombang kebencian terhadap Cina yang diamplifikasi melalui media sosial daring (Bown, 2021). Kompleksitas tekanan terhadap Cina tersebut tidak terlepas dari pilihan politik luar negeri Amerika Serikat yang juga memainkan peran penting melalui tekanan diplomatik maupun politik. Dengan demikian, tekanan-tekanan tersebut mendorong para pengambil keputusan Cina selama krisis COVID-19 untuk merumuskan kebijakan sebagai respons strategis untuk segera memulihkan keadaan internasional yang kurang menguntungkan Cina (Ripsman, 2016).

Amerika Serikat secara intens berusaha mempolitikasi krisis COVID-19 di Cina dan diikuti langkah penutupan perbatasan. Presiden Trump terus-menerus menarasikan Cina sebagai sumber permasalahan dan harus bertanggung jawab dalam krisis COVID-19 (Kim, 2023). Tindakan Amerika Serikat dinilai sebagai upaya menurunkan kredibilitas Cina, sehingga Amerika Serikat dapat mengambil kepercayaan publik yang

akibat kebijakan *America First* (Gordon, 2020). Amerika Serikat berusaha mengalihkan berbagai isu dan permasalahan COVID-19 dalam negeri dengan menyalahkan Cina sebagai episentrum COVID-19 dan sumber segala krisis global yang sedang terjadi (Kim, 2023). Trump melihat kondisi ini sebagai peluang melemahkan pengaruh Cina dalam tatanan internasional. Pada Februari 2020, Trump mengenakan terminologi “Virus Cina” dan “Virus Wuhan” dalam setiap pidato publiknya sehingga menciptakan retorika anti-Cina (Rogers, 2020). Pada April 2020, Trump terus mengulangi narasi bahwa Cina gagal mengendalikan virus sehingga menyebar ke seluruh dunia.

Kondisi ini menimbulkan ketidakamanan di antara elite Cina, terutama rusaknya kepercayaan publik terhadap Cina sebagai *responsible great power* (Ignatius, 2020). Berbagai tekanan tersebut berusaha dibantah oleh para elite Cina sebagai mekanisme melepas tekanan internasional. Dengan kondisi demikian, Cina segera membentuk mekanisme operasional merespon COVID-19 diantaranya menutup diri dan menolak berbagai kerjasama utamanya oleh WHO. Tindakan tersebut umum terjadi terutama bagi negara yang sedang mengalami tekanan publik yang cukup tinggi untuk melindungi citra internasionalnya. Negara juga cenderung bersikap egosentris dan menekankan perilaku *self help* terutama ketika proyeksi krisis COVID-19 belum jelas kedepannya. Meskipun demikian, Cina menunjukkan transformasi perilaku yang cukup anomali terutama dengan menjadi semakin kooperatif. Hal tersebut jelas menyalahi asumsi umum negara dalam merespon tekanan dan rangsangan sistemik yang sedang berlangsung seperti dalam krisis COVID-19.

Dengan demikian, perlu melihat lebih luas terutama dengan adanya *intervening variables* untuk memahami transformasi perilaku Cina dalam krisis COVID-19. Rangsangan dan tekanan sistemik tersebut tidak serta merta membentuk perilaku dan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam konteks Cina dan krisis COVID-19, setelah kondisi semakin terkontrol dan informasi mengenai krisis berhasil dikumpulkan oleh elite dan pemerintah. Cina merubah perilakunya dengan segera memulihkan kehidupan nasional sembari melakukan pendistribusian bantuan medis. Pendistribusian tersebut kelak dikenal sebagai diplomasi masker dan diplomasi vaksin. Reaksi tersebut dapat dianalisis melalui *neoclassical realism* tipe III, di mana sistem internasional membentuk parameter relatif yang mempengaruhi strategi negara, termasuk waktu dan pola penyesuaian kebijakan (Ripsman, 2016).

Diplomasi Vaksin

Dalam konteks Cina, seringkali respons terhadap kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh situasi internasional dan faktor dalam negeri yang fluktuatif. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina tidak hanya berfungsi untuk merespons tantangan dan tekanan eksternal ketika terjadi krisis COVID-19. Lebih dari itu, kedua jenis diplomasi tersebut muncul dan berperan sebagai instrumen PKC dan Xi untuk memenuhi kepentingan domestiknya (Sun & Yu, 2022; Lee, 2021). Dengan kata lain, terdapat proses translasi sebelum menjadi sebuah kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh berbagai variabel tingkat unit di level domestik. Oleh sebab itu, melihat isu melalui lensa tingkat unit memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Cina mengelola hubungan internasionalnya. Hal ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan internasional modern, di mana faktor domestik dan internasional saling mempengaruhi. Dengan kata lain, rangsangan sistemik internasional mengkondisikan perilaku negara, namun efek dari rangsangan tersebut dimoderasi oleh variabel tingkat unit (Ripsman, 2016).

3.2.1 *Leader Images*: Persepsi Elit Kebijakan Cina dalam Krisis COVID-19

Pemahaman mengenai variabel tingkat unit dalam diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina penting untuk menguraikan dinamika hubungan internasional Cina. Penulis berpendapat bahwa persepsi yang dibentuk dari citra pemimpin Cina, khususnya Xi Jinping dan elite PKC memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan kebijakan. Dalam prosesnya, pemimpin tidak dapat dilepaskan dari berbagai bias sebagai filter kognitif yang mempengaruhi cara pemimpin memahami sebuah informasi (Ripsman, 2016). Jika dikontekstualisasikan, Xi mempersepsikan bahwa lingkungan eksternal Cina semakin menantang, terutama ketika krisis COVID-19 berlangsung. Xi merasa bahwa Cina semakin rentan dalam menghadapi pandemi COVID-19, meskipun memiliki kecukupan kapasitas ekonomi dan politik (Bradsher, 2020).

Respon ketidakamanan Cina tersebut termanifestasikan dalam pertemuan Xi Jinping dengan Tedros Adhanom selaku Direktur Jenderal WHO. Pertemuan tersebut dilakukan pada 28 Januari dan mendiskusikan mengenai kolaborasi berkelanjutan dalam menangani penularan virus di Wuhan. Xi Jinping juga diminta untuk membagikan data-data terkait kebutuhan penanganan dan pengembangan tindakan medis seperti vaksin dan pengobatan. Xi Jinping juga terbuka terhadap skema dan mekanisme

kerjasama terutama dengan pengerahan tim teknis dari WHO. Keseluruhan hasil kerja tersebut tertuang dalam WHO China Joint Mission on COVID-19 Final Report pada 28 Februari 2020 (Zhao, 2020). Meskipun ada komitmen baik dari Cina dalam masa awal penyebaran COVID-19, tekanan internasional justru semakin membesar. Amerika Serikat dan sekutunya berusaha menggambarkan Cina sebagai sumber permasalahan COVID-19 hingga menyinggung sentimen ras tertentu (Burki, 2020).

Tekanan tersebut membuat marah elite Cina dan hanya akan meningkatkan ketegangan antara kedua negara, sekaligus menghasilkan *xenofobia* (Kim, 2023). Pada 14 Maret 2020, Xi menyatakan secara publik bahwa Trump telah menggunakan pandemi COVID-19 untuk menyerang Cina secara politik. Menteri Luar Negeri Wang Yi juga menolak tuduhan tersebut dan mengatakan sebagai upaya Trump mengalihkan perhatian dari kegagalan Amerika Serikat menangani pandemi (Wong, 2020). Pada April 2020, Wang Yi menyatakan bahwa Cina telah melakukan mekanisme terbaik untuk menekan penyebaran COVID-19. Bahkan, Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, membagikan teori konspirasi bahwa Amerika Serikat sesungguhnya berada di balik virus tersebut (Scott & Marlow, 2020).

Elite Cina berusaha melawan narasi sekaligus mempertahankan citra Cina yang semakin menurun di lingkungan internasional. Dalam pandangan para pembuat kebijakan Cina, konsekuensi langsung dari politisasi Amerika Serikat adalah memunculkan skeptisisme global terhadap upaya solutif Cina (Rogers, 2020). COVID-19 telah menjadi titik friksi perselisihan antara Cina dan Amerika Serikat, bersamaan dengan masalah lainnya seperti Taiwan, hak asasi manusia, dan perdagangan (Sivakumar & Deepthi, 2021). Elite Cina mencermati tekanan eksternal dengan persepsi sebagai ancaman terhadap kekuasaan Cina di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, Cina berusaha bekerja sama dan mendistribusikan bantuan medis dalam kerangka diplomasi masker untuk menunjukkan komitmennya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Diplomasi tersebut dilakukan secara berkala dan baru dirasakan maksimal pada pertengahan tahun 2020 (Sun & Yu, 2022).

Inisiatif terbaru Cina dalam diplomasi masker dan diplomasi vaksin mencerminkan adanya konsensus di antara para pemimpin Cina. Konsensus tersebut berisi respons terhadap tekanan internasional, utamanya dari Amerika Serikat, yang memperburuk citra internasional Cina. Xi Jinping menilai diplomasi masker dan diplomasi vaksin sebagai instrumen efektif untuk mengurangi tekanan internasional terhadap Cina dan membangun kembali citra internasional Cina sebagai kekuatan besar yang bertanggung

jawab (Rolland, 2020). Hal ini mencerminkan bahwa ketika geopolitik global semakin kompleks, perspektif pemimpin negara berperan dalam membentuk arah kebijakan. Hal ini sesuai dengan *neoclassical realism* tipe III bahwa perilaku suatu negara mungkin lebih berkaitan dengan keyakinan dan gambaran pemimpinnya daripada kendala sistemik objektif (Ripsman, 2016).

Kemunculan diplomasi masker dan diplomasi vaksin tidak hanya terjadi karena adanya persepsi pemimpin Cina terhadap tekanan internasional, melainkan juga adanya peluang internasional yang harus dimanfaatkan Cina. Xi meyakini bahwa kegagalan Amerika Serikat dalam mengelola krisis COVID-19 dapat menjadi titik balik Cina untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai *responsible great power* (Lee, 2022). Hal tersebut diperkuat dengan melemahnya pengaruh Amerika Serikat dalam tatanan internasional setelah Trump terpilih dengan kebijakan *American First* (Gordon, 2020). Kebijakan ini berimplikasi pada penarikan keanggotaan Amerika Serikat dari WHO pada 3 Mei 2020. Kondisi absennya *great power* dalam permasalahan kesehatan global membuka peluang bagi Cina untuk unjuk diri dengan kapasitas industri kesehatannya yang semakin berkembang. Xi dan Cina memulai inisiatif kerja sama penanganan COVID-19 yang sempat hilang dalam hubungan internasional melalui diplomasi masker dan diplomasi vaksin (Sun & Yu, 2020).

Pembentukan persepsi pemimpin yang mempengaruhi munculnya diplomasi masker dan diplomasi vaksin juga terefleksi dalam dinamika politik domestik Cina. Xi Jinping menilai kemunculan COVID-19 berimplikasi pada berbagai krisis domestik yang membahayakan keberlanjutan legitimasi yang didasarkan pada kepuasan masyarakat (Li & Li, 2022). Pada awal kemunculan krisis COVID-19, Xi segera merancang mekanisme respons tanggap darurat untuk memulihkan kehidupan nasional. Beberapa kebijakan tersebut menyebabkan perlambatan ekonomi utamanya setelah pemerintah Xi memberlakukan kebijakan *lockdown*. Pembatasan mobilitas sosial dan penutupan perbatasan cukup mengurangi pendapatan nasional yang didominasi oleh sektor perdagangan internasional (Kawate, 2022). *Lockdown* juga menyebabkan berhentinya berbagai sektor industri Cina sehingga sirkulasi barang dan uang domestik mengalami penurunan. Dengan kondisi tersebut, terjadi guncangan ekonomi di dalam negeri Cina yang harus segera direspons oleh Xi dan PKC.

Elite Cina sepakat bahwa stabilitas domestik dapat mendorong partisipasi Cina dalam tatanan internasional. Pada awalnya, persepsi pemimpin Cina berusaha mengkonstruksi perilaku untuk mengesampingkan tekanan serta konflik eksternal dan

mulai melakukan langkah pemulihan nasional. Serangkaian kebijakan diaplikasikan dan terbukti berhasil menekan angka dan penyebaran COVID-19 sehingga kehidupan domestik dapat mulai berjalan kembali. Cina lantas memulai proyeksi kebijakan luar negeri dengan didukung sumber daya nasional melalui inisiatif kerja sama kesehatan global. Hal itu untuk menjajaki prinsip diplomatik yang aktif sekaligus menguji seberapa jauh penerimaan pengaruh Cina di tengah kondisi krisis COVID-19 (Huang, 2021). Selain memberikan kepercayaan diri yang lebih besar kepada Cina dalam kemampuannya untuk menerapkan pendekatan kebijakan luar negeri yang aktif. Krisis COVID-19 juga membuka jalan kebijakan yang lebih partisipatif dalam meredakan ketegangan, seperti diplomasi masker dan diplomasi vaksin (Lee, 2021).

3.2.2 Fundamental Budaya Strategis *Tianxia* dan *Hehe* dalam Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin

Intervening unit variable kedua yang mempengaruhi pembentukan diplomasi masker dan diplomasi vaksin yaitu budaya strategis. Budaya strategis mencerminkan karakteristik khas negara dan membentuk respons sebuah negara (Ripsman, 2016). Pandangan umum yang mempengaruhi nilai-nilai dasar, keyakinan, dan cara berpikir. Para pengambil keputusan Cina dengan sadar atau tidak sadar mewujudkan nilai budaya yang mendasari dalam proses pengambilan kebijakan. Meskipun demikian, pengaruh budaya strategis terhadap kebijakan luar negeri bersifat relatif dalam *neoclassical realism*. Sejak kepemimpinan Xi, faktor budaya strategis memiliki dampak substansial yang meningkat pada proses pembuatan kebijakan luar negeri (Zhang, 2019).

Diplomasi masker dan diplomasi vaksin merefleksikan adanya budaya strategis *tianxia* dan *hehe*. Pandangan *tianxia* berasal dari dinasti Zhou yang dikenalkan oleh Zhao Tingyang (2005). Konsep inti *tianxia* adalah memandang dunia sebagai ruang politik publik yang mempertimbangkan masalah internasional dari perspektif global (Jiang, 2007). Semangat kerja sama dan tata pemerintahan kolektif menjadi fundamental dalam filosofi *tianxia*. Selain itu, *tianxia* merupakan pemikiran paling mendasar dari bangsa Cina tentang hubungan internasional (Zhou, 2017; He, 2018). Pada Forum Boao untuk Asia yang diselenggarakan pada Maret 2015, Presiden Xi menekankan bahwa manusia hanya memiliki satu planet, dan negara-negara berbagi dalam satu dunia. Dengan demikian Xi memimpikan adanya kebaikan bersama yang tidak dapat dilepaskan satu sama lainnya. Xi mendorong pembangunan masyarakat bersama sebagai manifestasi penting *tianxia*.

Tianxia yang diusung melalui diplomasi masker dan diplomasi vaksin merupakan pendekatan *soft power* untuk memantapkan pengaruh Cina. Dalam perkembangannya Cina tidak lagi dianggap agresif untuk mengambil hegemoni Amerika Serikat dalam tatanan global. Cina melalui *tianxia* mencoba menawarkan aspek politik moral dengan penekanan bahwa Cina memiliki kapasitas dalam menghadapi krisis global COVID-19. Cina juga mendorong lebih jauh pada tatanan kosmopolitan dimana tidak ada negara yang mengambil beban sistemik sebagai *responsible great power* (Lee, 2021). Selain itu, Cina juga mengharapkan perbaikan citra sebagai promotor tatanan global yang ideal dan berkeadilan. Bahkan lebih jauh, Cina ingin mendefinisikan ulang sistem politik global untuk komunitas masa depan bersama umat manusia yang lebih akomodatif (Lin, 2023).

Terdapat budaya strategis lain yang juga mempengaruhi munculnya diplomasi masker dan diplomasi vaksin yaitu *hehe*. *Hehe* merupakan elemen budaya fundamental yang membangun gagasan ideal masyarakat Cina dalam budaya konfusian. *Hehe* mencerminkan aspirasi mendalam masyarakat Cina mengenai pentingnya menciptakan harmoni (Rosker, 2013). Hal ini terlihat dari diplomasi masker dan diplomasi vaksin yang merupakan upaya perwujudan pandangan dunia yang harmonis dengan menciptakan ketenangan di tengah krisis. Cina menciptakan ketenangan dunia dengan mendistribusikan kebutuhan medis mendasar dalam krisis COVID-19 (Huang, 2021). Cina berusaha memperlakukan negara lainnya dengan baik tanpa membedakan ideologi maupun kepentingan sehingga bersatu dalam kerja sama. Dengan kata lain, terdapat semangat harmoni dan hidup berdampingan dalam menyelesaikan masalah global COVID-19.

Variabel budaya strategis memiliki beberapa kelemahan namun penting untuk tetap diakomodasi. Dinamika politik dan pengambilan kebijakan suatu negara tidak terlepas dari pengaruh budaya yang terinternalisasi dalam sosok pemimpin. Meskipun demikian, proses pembuktiannya cukup sulit ditemukan secara tekstual karena sifat budaya strategis yang abstrak. Bahkan, para FPE sangat sedikit menyatakan secara eksplisit peran budaya karena berkelindan dalam kepribadian seseorang (Finley, 2009). Meskipun demikian, berkembangnya analisis studi hubungan internasional dan domestik Cina memberikan wawasan berupa pengakomodasian dua budaya strategis (*tianxia dan hehe*) dalam diplomasi masker dan diplomasi vaksin (Pestana & Gomez, 2022) (Lin, 2023) (Nauvarian & Ma'rifat, 2023). Kedua budaya tersebut sering disebutkan dalam analisis mengenai perkembangan kebijakan luar negeri Cina modern.

Diplomasi Vaksin

Institusi domestik pada dasarnya mempengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara sehingga menjadi *intervening unit variable*. Pengaruh tersebut dimanifestasikan melalui berbagai instrumen dan kelembagaan politik domestik. Dalam konteks diplomasi masker dan diplomasi vaksin, institusi domestik PKC memiliki legitimasi kuat berdasar konstitusi Cina. PKC memiliki kewenangan dalam merumuskan segala arah kebijakan domestik maupun internasional Cina. Kekuasaan PKC diperkuat melalui laporan Kongres Nasional ke-19 tahun 2017 (Swaine, 2017). Kepemimpinan PKC dalam urusan luar negeri tercermin dalam laporan politik kongres berikutnya yang secara eksplisit menentukan penilaian Cina terhadap situasi global dalam jangka waktu tertentu (Xinhua, 2018).

PKC diorganisir secara penuh oleh Xi dan anggota Politbiro. Dalam Politburo terdapat KPULNP (Komisi Pimpinan Urusan Luar Negeri Pusat) yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan koordinasi urusan luar negeri (Legarda, 2018). Dalam PKC terdapat Perdana Menteri Li Keqiang dan Wang Yi, keduanya merupakan dua tokoh Politbiro yang berpengaruh dalam konteks diplomasi masker dan diplomasi vaksin. Mereka bekerja sama dengan Xi Jinping untuk melaksanakan diplomasi masker dan diplomasi vaksin. Wang Yi secara khusus mendorong pemberian paket bantuan masker kepada negara-negara Asia Tenggara pasca pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN-Cina pada tanggal 20 Februari 2020 (Xianbai, 2020). Wang Yi berkomunikasi dengan negara mitra mengenai mekanisme pengiriman paket bantuan medis dan mendorong Xi untuk menjangkau pemimpin negara di wilayah Asia lainnya.

Sementara itu, Li Keqiang merupakan inisiator munculnya diplomasi vaksin setelah Cina mampu mengembangkan vaksin COVID-19. Sebelum disetujui oleh Politbiro, Li telah menjanjikan kepada publik Asia Tenggara mengenai kemudahan akses vaksin COVID-19 (Marques, 2020). Kemudian pada Juli 2021, Politbiro menyetujui kebijakan diplomasi vaksin dan mulai diberlakukan pada Agustus 2021. Li menilai diplomasi vaksin sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan dalam melawan pandemi. Li juga mengkritik negara-negara yang mempraktikkan nasionalisme vaksin (Yeophantong & Shih, 2021). Nasionalisme vaksin mengacu pada kecenderungan suatu negara untuk memberikan prioritas akses vaksinasi COVID-19 kepada penduduknya. Li menilai tindakan tersebut tidak bertanggung jawab dan menghambat upaya global

memerangi COVID-19. Kedua tokoh di atas merepresentasikan pengaruh variabel institusi domestik Politbiro dalam diplomasi masker dan diplomasi vaksin.

PKC mendorong distribusi masker dan vaksin di negara-negara selatan untuk memberikan alternatif kepemimpinan global. PKC ingin menjembatani kesenjangan ekonomi dan perbaikan kehidupan bagi negara-negara dengan penghasilan rendah. Selain itu, PKC aktif menyuarakan solidaritas ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan masker serta vaksin. Logika diplomasi masker dan diplomasi vaksin tidak terlepas dari adanya keinginan membangun otoritas PKC dan perluasan posisi Cina dalam sistem internasional (Thomas, 2020). Cina berupaya memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang tidak hanya menghasilkan perbaikan situasi kesehatan, namun juga memperkuat pengaruh politik dan ekonomi Cina. Potensi keberhasilan diplomasi vaksin Cina bergantung pada apakah negara-negara utara dapat memberikan dosis yang cukup kepada negara-negara berkembang (Marques, 2021).

Institusi domestik lainnya yang mempengaruhi diplomasi masker adalah PLA (*People Liberation Army*) dengan mendukung upaya pemerintahan Xi dalam pendistribusian. Pada Maret dan Juni, PLA telah mengirimkan masker dan alat pelindung diri ke 46 negara (Legarda, 2020). PLA juga mengadakan konferensi video dengan militer negara mitra untuk berbagi pengalaman memerangi COVID-19. Diplomasi tersebut juga dilakukan untuk memperbaiki citra militer Cina yang dipandang agresif terutama dalam konteks Laut Cina Selatan (Shaoyu, 2023). Upaya tersebut merupakan perluasan promosi kerjasama keamanan nasional Cina dan upaya diplomatik sebagaimana yang diinstruksikan Xi dalam *China's Defence White Paper 2015*. Xi mendorong PLA harus meningkatkan perannya dalam kebijakan luar negeri Cina melalui diplomasi militer utamanya dalam konteks pandemi (Nouwens, 2021).

Diplomasi masker PLA dilakukan lebih strategis dan minim publisitas jika dibandingkan diplomasi masker oleh pemerintahan Cina (Legarda, 2020). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya tujuan berbeda di balik kampanye diplomasi masker militer Cina. Sumbangan pemerintah dimaksudkan untuk mengubah narasi COVID-19 menjadi lebih positif dan memperoleh pujian atas cara Cina menangani wabah virus COVID-19 (Allen, 2021). Di sisi lain, sumbangan PLA tampaknya sebagian besar bersifat simbolis dan menggunakan sumbangan sebagai alat diplomasi pertahanan (Nouwens, 2021). Sumbangan PLA tampaknya jauh lebih kecil. Satu-satunya diplomasi yang jumlahnya dipublikasikan adalah sumbangan kepada militer Zimbabwe sebanyak 62.000 masker dan 19.000 APD. Bahkan, sumbangan PLA ditujukan untuk membangun

hubungan dengan elite pertahanan yang mampu mendukung harapan ekspansi global Cina (Allens, 2021). Upaya ini mempunyai implikasi penting di Asia Tenggara, mengingat perilaku Cina yang agresif di kawasan Asia-Pasifik.

Tidak hanya dalam bentuk institusi kelembagaan, sistem pemerintahan di Cina juga mempengaruhi kemunculan diplomasi masker dan diplomasi vaksin. Sistem pemerintahan Cina yang terpusat memudahkan Xi mengaplikasikan kebijakan tanggap darurat untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Xi berusaha menyelesaikan persoalan dalam negeri dengan fokus pada kemandirian ekonomi dan jaringan sistem kesehatan komunitas. Penyelesaian masalah domestik menjadi prioritas untuk menaikkan kapasitas Cina dalam berkontribusi secara global (Huang, 2021). Xi mengambil respons cepat dengan mengumumkan karantina wilayah, pengujian massal, dan pembangunan rumah sakit baru (Zhou et al., 2021). Kebijakan tersebut dapat menekan jumlah pasien COVID-19 di Cina dan menuju pemulihan secara berkala.

Xi dan PKC juga berupaya menciptakan stabilitas perekonomian domestik dengan mengeluarkan stimulus fiskal sebesar \$540 miliar (Funke & Tsang, 2020). Langkah-langkah ini berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian, sehingga memudahkan Xi menginstruksikan beberapa provinsi untuk memproduksi satu alat medis. Misalnya, provinsi Hubei memproduksi masker serta sarung tangan dan Provinsi Sichuan berfokus pada pakaian pelindung (Sun et al., 2021). Pemerintah provinsi bekerja sama dengan perusahaan swasta sehingga Cina mampu memproduksi 1 miliar masker, 1,5 miliar sarung tangan, dan 500 juta pakaian pelindung (Wang et al., 2020). Hal tersebut jelas membantu mensukseskan diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina.

3.2.4 Hubungan Masyarakat dan Negara Cina selama Krisis COVID-19

Intervening unit variable terakhir yaitu hubungan masyarakat dan negara utamanya Cina. Pada tanggal 24 Januari 2020, Presiden Xi memberikan pidato kepada pejabat di Wuhan mengenai COVID-19 dan sejumlah tantangan terhadap legitimasi pemerintah (Tan, 2020). Pada pertemuan tersebut muncul sejumlah aspirasi baru dari rakyat di antaranya untuk hidup sehat dan aman dari COVID-19, serta kehidupan yang stabil di tengah krisis perekonomian Cina (Cheng et al., 2022). Kemunculan aspirasi tersebut membuat para pengambil kebijakan Cina memberikan perhatian lebih besar pada masalah domestik. Oleh sebab itu, Xi mengambil langkah strategis dan berhasil mengendalikan COVID-19 serta mengurangi dampak pandemi terhadap kehidupan rakyat (Tian et al., 2020). Selain itu, kesuksesan tersebut juga mendorong pemerintah

untuk mendistribusikan alat medis dan memperoleh sentimen positif dari masyarakat.

Hal ini tentunya melibatkan dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat Cina yang kompleks.

Dalam suatu pemerintahan, kelas penguasa berupaya memperoleh legitimasi politik untuk mendayagunakan kekuatan negara dengan upaya dan biaya administratif minimal (Ripsman, 2016). Jiang Zemin menegaskan bahwa dalam proses pemerintahan, hanya rakyat yang berfungsi sebagai hakim tertinggi atas kualitas kinerja pemerintah. Hu Jintao menekankan bahwa advokasi rakyat adalah sumber kekuatan dan fondasi kesuksesan meningkatkan kemampuan pemerintahan partai (Chu, 2013). Oleh karena itu, peran rakyat berkaitan dengan pemberian legitimasi terhadap kebijakan luar negeri yang diformulasikan oleh PKC sangat fundamental. Dengan kata lain, kepuasan masyarakat Cina sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan.

Menurut survei Pew Research Center (2019) sebelum COVID-19, 88% masyarakat Cina percaya bahwa pemerintah pusat bekerja untuk kepentingan rakyat. Survei ini juga menunjukkan bahwa 92% orang Cina puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani permasalahan ekonomi. Meskipun demikian, tingkat kepuasan tersebut mengalami penurunan signifikan setelah kemunculan COVID-19 sebanyak 43%. Ketidakpuasan tersebut berkelindan dengan terangkatnya permasalahan lainnya seperti keamanan pangan, keamanan obat, kualitas perumahan, dan lingkungan hidup. Pengambilan kebijakan menjadi lebih kompleks ketika terjadi ketidaksepakatan antara negara dan masyarakat (Ripsman, 2016).

Dalam konteks Cina, awalnya legitimasi pemerintah berasal dari prestasi revolusioner PKC dan karisma para pemimpin. Pasca-Deng, legitimasi dikaitkan dengan peningkatan kehidupan materi dan pertumbuhan ekonomi (Chu, 2013). Setelah beberapa dekade kinerja ekonomi tidak lagi mencukupi untuk memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Cina membutuhkan sumber legitimasi baru berupa prestasi dan pengaruh dalam politik internasional. Semakin mencolok performa diplomatik, semakin bangga masyarakat dalam negeri, semakin tinggi kesatuan nasional, dan semakin diakui pemimpin Cina (Kejin, 2015). Dengan kata lain, pemerintah Cina memanipulasi isu-isu luar negeri dan memutar kebijakan luar negeri untuk audiens domestik guna meningkatkan dukungan dalam mempertahankan kekuasaan (Hagan, 1995).

Diplomasi masker dan diplomasi vaksin memiliki efikasi yang sama dalam peningkatan legitimasi sebagaimana pemberantasan korupsi dan penghapusan

kemiskinan. Pembangunan ekonomi dalam negeri yang dibawa oleh produksi alat medis adalah dukungan substansial legitimasi yang penting bagi PKC (Yushi, 2023). Diplomasi masker dan diplomasi vaksin juga memberikan manfaat sebagai sarana mengoptimalkan persepsi publik domestik tentang kekuatan Cina yang bertanggung jawab serta memperkuat basis dan menjaga dominasi PKC melalui strategi internalisasi isu-isu global (Kanwall, 2022). Dampak efektif dari diplomasi masker dan diplomasi vaksin terasa dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat. Diplomasi masker dan diplomasi vaksin bertujuan memperkuat kredibilitas pemerintah Cina dan mendorong masyarakat Cina untuk mempercayai pandangan yang dianut oleh Xi dan PKC.

Legitimasi dalam hubungan negara-masyarakat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan luar negeri secara signifikan. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan kepada negara, maka pelaksanaan kebijakan luar negeri menjadi mudah (Ripsman, 2016). Hal ini memungkinkan negara menjadi otoritas yang memiliki daya tarik dan menjalankan pemerintahan dengan efisien. Sebaliknya, jika pemerintah kekurangan legitimasi dan represif, maka akan merusak kredibilitas kebijakan luar negeri negara di mata dunia (Chu, 2013). Oleh karena itu, diplomasi masker dan diplomasi vaksin sebagai alat politik sangat menguntungkan pemerintahan Cina. Keduanya memperlihatkan bagaimana PKC memanfaatkan kebijakan luar negeri untuk memperkuat legitimasi pemerintahannya. Ini sesuai dengan *neoclassical realism* tipe III di mana variabel hubungan negara-masyarakat mempengaruhi kemampuan negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri.

Dengan terus berjalannya reformasi dan keterbukaan di Cina, struktur kepentingan ekonomi dan politik telah terdiferensiasi. Kelompok kepentingan yang kuat dengan skala organisasi yang besar tanpa ragu mempengaruhi dinamika pengambilan keputusan pemerintah Cina. BUMN Cina yang besar adalah contoh nyata dari kelompok kepentingan tersebut. Pemimpin BUMN besar didominasi oleh anggota dari Komite Pusat PKC, dan beberapa di antara mereka bahkan telah dipromosikan menjadi anggota Politburo dan Komite Tetap (Milhaupt, 2015). BUMN besar Cina mendominasi posisi penting dalam industri dan bidang kunci yang sangat vital bagi kehidupan ekonomi nasional. Perusahaan-perusahaan semacam ini membawa tanggung jawab besar dalam mendukung, membimbing, dan mendorong perkembangan sosial dan ekonomi Cina (Lin et al., 2020).

BUMN akan memperhatikan arah kebijakan luar negeri dan menyelaraskan keuntungan komersial mereka (Zhang, 2020). Misalnya, BUMN yang memiliki kepentingan produksi alat medis akan mendukung kepentingan nasional dan merelevansikan terhadap perlindungan hak kesehatan masyarakat Cina. Hal tersebut terlihat jelas ketika CMDIG (*China Medical Device Industry Group*) memberikan saran kepada Xi untuk investasi pendanaan besar dalam merespon kondisi krisis COVID-19 (Yushi, 2023). Hal tersebut membuat Cina mampu memproduksi alat medis dan mendistribusikannya secara global. CMDIG juga meyakinkan Xi mengenai kapasitas industri alat medis dalam negeri dan peluang menjadi keuntungan ekonomi nasional. Dengan kata lain, industri alat medis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sempat lesu dan menurun karena krisis COVID-19 (Jansen, 2020).

Beberapa perusahaan farmasi swasta Cina juga mempengaruhi kebijakan diplomasi vaksin. Sinopharm memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Cina serta memiliki kepentingan yang sama, yaitu menekan penyebaran COVID-19 dan menjaga citra internasional Cina (Wee, 2020). Hubungan tersebut membuka peluang besar bagi Sinopharm untuk mendapat dukungan ekonomi maupun politik (Zhang & Jamali, 2022). Produksi dan distribusi vaksin tersebut menguntungkan kedua belah pihak: Sinopharm mendapatkan kesempatan akses ke pasar internasional dan pemerintah Cina memperoleh vaksin COVID-19 untuk meningkatkan citranya di dunia internasional.

3.3 Variabel Dependen: Tiga Fase Interaksi Antarvariabel Unit dalam Diplomasi Masker dan Diplomasi Vaksin

Ripsman (2016) mendefinisikan variabel dependen sebagai bentuk kebijakan hasil penyesuaian strategis dalam merespon krisis yang melibatkan integrasi berbagai elemen kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam penelitian ini, diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina menjadi variabel dependen. Kedua kebijakan diplomasi tersebut telah berkembang sepanjang krisis COVID-19. PKC dan Presiden Xi berupaya mengejar status kepemimpinan dalam tata kelola kesehatan global melalui pendistribusian paket bantuan kepada negara lainnya (Sun & Yu, 2022). Xi berupaya menciptakan realitas baru di lapangan seperti partisipasi dan kontribusi faktual terhadap penyelesaian krisis COVID-19. Proyek diplomasi masker dan vaksin dimulai ketika Cina mampu memulihkan krisis COVID-19 dalam negeri. Pada akhir 2020, Cina telah mendistribusikan miliaran paket bantuan medis ke berbagai negara (Kim, 2023). Tindakan Cina berbagi alat medis demi kepentingan global memberikan insentif

diplomasi, utamanya meningkatnya citra, pengaruh, dan status Cina dalam politik internasional.

Proses kemunculan diplomasi masker dan diplomasi vaksin dimulai dari munculnya tekanan internasional terhadap Cina yang kemudian difilter melalui proses persepsi. Proses pembentukan persepsi dipengaruhi oleh citra kepemimpinan serta budaya strategis Cina. Para pengambil keputusan menilai bahwa posisi Cina semakin tidak menguntungkan dengan hadirnya tekanan Cina sebagai pihak yang paling bertanggung jawab sebagai episentrum COVID-19 (Lee, 2021). Selain itu, politik luar negeri Amerika Serikat juga turut mendorong persepsi bahaya di antara para pemimpin Cina. Dengan demikian, terdapat stimulus eksternal yang mendorong penciptaan persepsi oleh para FPE. Meskipun demikian, Xi tetap optimis melihat sektor kesehatan yang memiliki arti strategis dalam politik luar negeri Cina kontemporer (Huang, 2021). Cina juga mengalami peningkatan relatif kekuatan di sektor kesehatan dan berpeluang menjadi *leader in global health* (Kim, 2023).

Dari tekanan eksternal tersebut juga memunculkan persepsi di antara para pemimpin Cina untuk segera memulihkan krisis domestik. Pemulihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya untuk memobilisasi kebijakan luar negeri. Selain itu, penyelesaian krisis di tingkat domestik dapat meningkatkan kohesi sosial antara negara dan masyarakat sehingga memperkuat dukungan kepada otoritas pemangku kebijakan luar negeri. Setelah melalui proses persepsi maka masuk ke proses selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dengan mensentralisasi otoritasnya pada PKC dan memprioritaskan penyelesaian krisis COVID-19 di tingkat domestik (Zhou et al., 2021). Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kesehatan Cina melalui insentif dana kepada industri medis dan pengembangan vaksin. Keputusan tersebut erat kaitannya dengan pengaruh dari kelompok kepentingan seperti CMDIG dan perusahaan farmasi swasta Cina (Yushi, 2023).

Setelah kapasitas produksi alat medis mencukupi, Xi memutuskan surplus produksi didistribusikan ke negara lain dalam kerangka diplomasi masker dan diplomasi vaksin. Hal tersebut merupakan hasil rekomendasi dari anggota Politbiro sebagai bantuan kemanusiaan untuk meningkatkan citra internasional Cina (Sun & Yu, 2022; Lee, 2021). PKC dan PLA sebagai institusi sentral kemudian bersinergi untuk menjalankan diplomasi masker dan diplomasi vaksin. Pemberian bantuan tersebut dilakukan dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2022. Keseluruhan prosesnya dilaksanakan dengan tersentral di dalam pengaruh Xi Jinping dan PKC. Munculnya kebijakan diplomasi

masker dan vaksin juga tidak terlepas dari menurunnya angka kepuasan dan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan akibat COVID-19. Pemerintah membutuhkan sumber legitimasi baru dengan efikasi yang tinggi seperti pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam kondisi krisis COVID-19 sangat sulit untuk mencapai prestasi ekonomi sehingga kebijakan luar negeri yang humanis menjadi alternatif perolehan legitimasi PKC di dalam negeri (Kanwall, 2022).

Setelah diplomasi masker dan diplomasi vaksin diputuskan, maka proses selanjutnya yaitu implementasi dengan mempercepat penyelesaian krisis COVID-19 di tingkat domestik. Xi memberlakukan kebijakan pembatasan sosial dan pengujian massal yang ketat (Zhou et al., 2021). Ia juga mengakselerasi produksi alat medis dengan skema satu provinsi untuk satu sektor industri alat medis (Sun et al., 2021). Setelah keseluruhan kebutuhan alat medis dan vaksin terpenuhi, PKC bertanggung jawab dalam proses distribusi dan akomodasi di berbagai negara mitra. Lebih lanjut lagi, Cina mengutamakan negara-negara mitra BRI sebagai penerima masker dan vaksin (Sun & Yu, 2022). Keseluruhan proses tersebut melibatkan budaya strategis *tianxia* dan *hehe* untuk menciptakan perdamaian dan harmoni sosial di tingkat domestik maupun internasional.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa proses perumusan hingga implementasi diplomasi masker dan diplomasi vaksin memiliki kompleksitas yang tinggi. Analisis terhadap proses hingga implementasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *neoclassical realism* yang mengakomodasi *intervening variables*. Kombinasi variabel di tingkat internasional dan domestik jelas mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, sehingga menjadi relevan untuk mengaplikasikan *neoclassical realism* dalam konteks kebijakan luar negeri Cina, khususnya diplomasi masker dan diplomasi vaksin.

BAB IV

KESIMPULAN

Sejak pertama kali COVID-19 menginfeksi Cina pada tahun 2020, pemerintah Cina telah menjalankan kebijakan luar negeri yang menarik untuk dianalisis. Cina menjadi pihak yang dirugikan dengan adanya tekanan internasional oleh Amerika Serikat mengenai Cina episentrum COVID-19. Presiden Trump memandang Cina sebagai aktor yang paling bertanggung jawab dalam krisis kesehatan COVID-19. Selain itu, ekonomi Cina mengalami pemerosotan signifikan disertai dengan krisis sosial politik dalam negeri yang menunjukkan adanya kerentanan terhadap bahaya COVID-19. Presiden Xi menghadapi tekanan hebat yang membahayakan keberlanjutan kekuasaan dan pengaruh PKC. Tekanan tersebut membentuk perilaku transformatif Cina dari pasif tertutup menjadi aktif strategis melalui kebijakan luar negeri diplomasi masker dan diplomasi vaksin. Transformasi kebijakan tersebut dapat dijelaskan dalam kerangka analisis kebijakan luar negeri *neoclassical realism*.

Tindakan Cina tidak hanya dipandu oleh tekanan eksternal sebagaimana pandangan neorealis, namun terdapat juga berbagai variabel tingkat unit yang mengintervensi perilaku Cina. Meskipun tekanan internasional cukup besar terhadap Cina, Xi melihat krisis COVID-19 juga dapat menjadi peluang Cina menegaskan kepemimpinannya dalam tata kelola kesehatan dunia. Cina mulai mengirimkan berbagai kebutuhan medis dunia untuk memerangi krisis COVID-19 yang berfokus pada ketersediaan masker dan vaksin. Tekanan terhadap Cina mulai menurun, menjadi sebuah harapan kepada Cina untuk berkontribusi dalam krisis COVID-19. Pemilihan diplomasi masker dan diplomasi vaksin tersebut tidak terlepas dari konteks domestik sebagai *intervening variables*. Kombinasi faktor institusi domestik, budaya strategis Cina, dan relasi antara masyarakat dan negara mengkonstruksi kebijakan tersebut.

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan terkait metodologi, utamanya pendekatan studi kasus. Penelitian ini hanya memilih kasus yang dapat diverifikasi dengan pengujian hipotesis yang disederhanakan sebagai konfirmasi atas variabel-variabel. Penelitian ini juga memiliki kekurangan terkait dengan minimnya data primer berupa dokumen kebijakan terkait diplomasi masker dan diplomasi vaksin dari pemerintahan Xi Jinping. Hal tersebut berkaitan dengan minimnya publisitas kertas kebijakan dari pemerintahan Cina, sehingga peneliti lebih mengakomodasi pernyataan publik elite Cina. Selain itu, penelitian ini juga tidak berusaha untuk menggambarkan dan menilai konsekuensi kebijakan luar negeri Cina dan sejauh mana Cina akan memengaruhi sistem internasional. Penelitian ini bukanlah

penilaian atas ‘keberhasilan’ atau ‘kegagalan’ kebijakan luar negeri Cina. Pada dasarnya, penelitian ini ingin mengungkap proses konstruksi diplomasi masker dan diplomasi vaksin yang memiliki signifikansi dalam politik Cina modern.

Penelitian berusaha mengilustrasikan relevansi *neoclassical realism* dalam menjelaskan perilaku Cina selama krisis COVID-19, dengan menunjukkan kegunaan *neoclassical realism* sebagai pendekatan yang komprehensif memahami keputusan luar negeri sebuah negara. Hal tersebut dikarenakan analisis ini berusaha menekankan peran variabel domestik, sehingga menyajikan dasar teoritis yang lebih akurat mengenai perilaku Cina. Dengan menyelidiki alasan di balik kebijakan diplomasi masker dan diplomasi vaksin Cina, *neoclassical realism* membantu meningkatkan model teoritis yang ada dalam hubungan internasional dan analisis kebijakan luar negeri. Penelitian ini juga menunjukkan kepada penulis bahwa sekalipun dalam negara yang tersentral dan minim mekanisme demokrasi, pengambilan keputusan negara masih cukup kompleks dan banyak variabel yang mempengaruhinya. Hal tersebut membantah asumsi awal penulis mengenai simplifikasi terhadap proses kebijakan luar negeri Cina yang hanya dipengaruhi oleh sentralitas Xi Jinping dan tekanan internasional utamanya Amerika Serikat.

Dalam konteks studi hubungan internasional utamanya Cina, penelitian ini membawa alternatif utamanya dengan penggunaan *neoclassical realism* dalam analisisnya. Sejauh ini, hubungan internasional Cina selalu dikaitkan dengan neorealisme utamanya *balance of power* dan sebagai kekuatan revisionis. Di lain sisi, diplomasi masker dan diplomasi vaksin memiliki signifikansi sebagai rujukan kebijakan luar negeri utamanya bagi negara-negara yang memiliki kapasitas dan visi dalam tata kelola kesehatan global. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Cina dapat menjadi alternatif negara rujukan untuk tata kelola kesehatan global yang banyak didominasi oleh Amerika Serikat dan Eropa. Pada akhirnya, penelitian ini dapat memberikan informasi tidak hanya bagi mereka yang tertarik untuk lebih memahami kebijakan luar negeri Cina, tetapi juga mereka yang mencari panduan tentang bagaimana menerapkan *neoclassical realism* dalam kaitannya dengan negara, individu, dan kebijakan luar negerinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, K. (2021). Early Warning Brief: The PLA's Military Diplomacy Under COVID-19. *China Brief*, 21(13), 1–20.
- Basrur, R.M. (2001). Nuclear Weapons and Indian Strategic Culture. *Journal of Peace Research*, 38(2), 181-198.
- Bell, D. (2011). *Introduction*. Dalam X. Yan, D.A. Bell & Z. Sun (Eds.), *Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bickley, S.J., Chan, H.F. & Skali, A. (2020). How Does Globalization Affect COVID-19 Responses? *Globalization and Health Volume*, 18(57), 1–16.
- Bown, C.P. (2021). How Covid-19 Medical Supply Shortages Led to Extraordinary Trade and Industrial Policy. *Asian Economic Policy Review*, 17(1), 114–135.
- Bradsher, K. (2020, October 19). *With COVID-19 Under Control, China's Economy Surges Ahead*. The New York Times. Diakses pada 17 Oktober 2023, <https://www.nytimes.com/2020/10/18/business/china-economy-covid.html>
- Burki, T. (2020). China's Successful Control of Covid-19. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(11), 1240–1245.
- Chen, C. (2014, December 20). *Political legitimacy in post-Tiananmen China*. E-International relations. Diakses pada 27 Maret 2023, <https://www.e-ir.info/2014/12/19/political-legitimacy-in-post-tiananmen-china/>
- Chen Peijie, Li Fuzhong & Harmer, P. (2019). Healthy china 2030: Moving from Blueprint to Action with a New Focus on Public Health. *The Lancet Public Health*, 4(9), 23–31.
- Cheng Sixian, Zhao Yuxin, Kaminga, A.C. & Xu Huilan. (2022). China's Fight Against COVID-19: What We Have Done and What We Should Do Next? *Frontiers in Public Health*, 10, 1–16.
- Chorev, N. (2022). The World Health Organization Between the United States and China. *Global Social Policy*, 20(3), 378–382.
- Chu, Yun-han. (2013). Sources of Regime Legitimacy and the Debate over the Chinese Model. *China Review*, 13(1), 1–42.
- Cunningham, E. (2022, December 1). *Jiang Zemin propelled China's Economic Rise in The World, Leaving His Successors to Deal with the Massive Inequality That Followed*. The Conversation. Diakses pada 6 Maret 2023, <https://theconversation.com/jiang-zemin-propelled-Chinas-economic-rise-in-the-world-leaving-his-successors-to-deal-with-the-massive-inequality-that-followed-195675>
- Daemmrich, A. (2013). The Political Economy of Healthcare Reform in China: Negotiating Public and Private. *SpringerPlus*, 2(1), 11–19.
- Dueck, C. (2010). Neoclassical Realism and the National Interest: Presidents, Domestic Politics, and Major Military Interventions. Dalam *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*, Cambridge University Press.
- Farrer, M. (2022, September 20). *China's "Hidden Epidemics": The Preventable Diseases That Could Reshape a Nation*. The Guardian. Diakses pada 17 September 2023, <https://www.theguardian.com/world/2022/sep/21/chinas-hidden-epidemics>
- Finley, H. (2009). [Review of *Chinese Strategic Culture and Foreign Policy Decision-Making: Confucianism, Leadership and War*, by H. Feng]. *China Review International*, 16(2), 173–176. <http://www.jstor.org/stable/23733294>
- Funke, M. & Tsang, A. (2020). The People's Bank of China's Response to The Coronavirus Pandemic: A quantitative assessment. *Economic Modelling*, 93, 465–473.
- George, A., Li Changtai, Lim Jing Zhi & Xie Taojun. (2021). From Sars to COVID-19: The Evolving Role of China-ASEAN Production Network. *Economic Modeling*, 101.



- Gordon, P.H. (2020). "America First" is a Dangerous Fantasy in a Pandemic. *Foreign Affairs*. Diakses pada 08 Oktober 2023, <https://www.foreignaffairs.com/united-states/america-first-dangerous-fantasy-pandemi>
- Gray, C.S. (1999). Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back. *Review of International Studies*, 25(1), 49-69.
- Huang Yanzhong. (2010). Pursuing Health as Foreign Policy: The Case of China. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 17(1), 82-111.
- Ignatius, D. (2020, February 12). *How the Coronavirus threatens Xi's "chinese dream."* The Washington Post. Diakses pada 15 Oktober 2023, https://www.washingtonpost.com/opinions/how-the-coronavirus-threatens-xis-chinese-dream/2020/02/11/e899984e-4d0d-11ea-b721-9f4cdc90bc1c_story.html
- Jansen, L. (2020, November 5). *Industry innovation: How has covid-19 changed global healthcare?* World Economic Forum. Diakses pada 8 Oktober 2023, <https://www.weforum.org/agenda/2020/11/healthcare-innovation-covid-coronavirus-pandemic-response-health/>
- Katz, R., Kornblat, S., Arnold, G. & Fischer, J.E. (2011). Defining Health Diplomacy: Changing demands in The Era of Globalization. *Milbank Quarterly*, 89(3), 503–523.
- Kanwal, M. (2022). Rise of Chinese Public Diplomacy During COVID-19 Era. *SSRN Electronic Journal*, 1–14.
- Kawate, I. (2022, May 9). *Shanghai Lockdown Depresses China Trade Growth to 2-Year low*. Nikkei Asia. Diakses pada 10 Oktober, 2023, <https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/Shanghai-lockdown-depresses-China-trade-growth-to-2-year-low>
- Kejin, Z. (2015). The Motivation Behind China's Public Diplomacy. *The Chinese Journal of International Politics*, 8(2), 167–196.
- Kim, D.G. (2023). The Politicization of Covid-19 and Anti-Asian Racism in the United States: An Experimental Approach. *Journal of Experimental Political Science*, 1–11.
- Kobierecka, A. (2022). Post-Covid China: 'Vaccine Diplomacy' and The New Developments of Chinese Foreign Policy. *Place Branding and Public Diplomacy*, 19(3), 280–293.
- Kyte, R. (2020). Great Power, COVID-19, and Our Global Future. *The Fletcher Forum of World Affairs*, 44(2), 5–10.
- Lampton, D.M. (1974). Health Policy during the Great Leap Forward. *The China Quarterly*, 60, 668–698.
- Lancaster, K. (2020, April). *Mapping China's Health Silk Road*. Council on Foreign Relations. Diakses pada 1 November 2023, <https://www.cfr.org/blog/mapping-chinas-health-silk>
- Lee, S.T. (2021). Vaccine Diplomacy: Nation Branding and China's COVID-19 Soft Power Play. *Place Branding and Public Diplomacy*, 19(1), 64–78.
- Legarda, H. (2018, August 1). *In Xi's China, the Center Takes Control of Foreign Affairs.* – The Diplomat. Diakses pada 3 Oktober 2023, <https://thediplomat.com/2018/08/in-xis-china-the-center-takes-control-of-foreign-affairs/>
- Legarda, H. (2020, August 3). *The P/LA's Mask Diplomacy*. Merics. Diakses pada 23 September 2023. <https://merics.org/en/tracker/plas-mask-diplomacy>
- Li, O. & Wang Lin. (2021, August 12). *China's 14th five-Year plan: Broad Insights for The Healthcare and Pharmaceutical Industries*. Business for Social Responsibility. Diakses pada 10 November 2023, <https://www.bsr.org/en/blog/chinas-14th-five-year-plan>
- Li Xiangyuan & Li Haizheng. (2023, May 4). *The COVID-19 Pandemic's Impact on The Chinese Economy*. China Research Center. Diakses pada 19 Oktober 2023, <https://www.chinacenter.net/2023/china-currents/22-1/the-covid-19-pandemics-impact-on-the-chinese-economy/>
- Lin, K., Jingrong Lu, Xiaoyan Zhang & Zheng Yin. (2020). State-owned enterprises in

- China: A Review of 40 years of research and Practice. *China Journal of Accounting Research*, 13(1), 31–55.
- Lin, X. (2023). Covid-19, the Belt and Road Initiative, *Tianxia/The Chinese Universe*, and Universal Human Rights. *The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2021*, 3(5), 1–18.
- Lo, K. (2022, February 4). *Omicron May Make China's Covid Success "Fleeting"*, says US report. South China Morning Post. Diakses pada 3 November 2023, <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3165703>
- Lobell, S.E., Ripsman, N.M. & Taliaferro, J.W. (2010). *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*. Cambridge University Press.
- Marques, C.F. (2021, September 2). *Vaccine Diplomacy Isn't Working It's Time for a New Approach*. Bloomberg. Diakses pada 7 November 2023, <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-09-02>
- Meng Zhigang, Shan Shoujin & Zhang Ruilian. (2021). China's COVID-19 Vaccination Strategy and Its Impact on The Global Pandemic. *Risk Management and Healthcare Policy*, Volume 14.
- Milhaupt, C.J. (2015). The Governance Ecology of China's State-Owned Enterprises. *Oxford Handbooks*, 1–14.
- Mohanty, M. (2012). "Harmonious Society": Hu Jintao's Vision and the Chinese Party Congress. *Economic and Political Weekly*, 47(50), 12–16.
- Nauvarian, D., & Ma'rifat, F. M. (2023). From Friction to Acceleration: China's Ambition for a Post-Pandemic Tianxia World Order. *Global South Review*, 3(1), 62. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.69759>
- Nouwens, M. (2021). The evolving nature of China's military diplomacy: from visits to vaccines. *The International Institute for Strategic Studies*, 1(1), 89–16.
- Pestana, L., & Gomes, N. (2022). China's tianxia and foreign policy in the pandemic context. *JANUS NET E-Journal of International Relation*, 13(2), 1-13.
- Pietrzak-Franger, M., Lange, A. & Söregi, R. (2022). Narrating the Pandemic: Covid-19, China and Blame Allocation Strategies in Western European Popular Press. *European Journal of Cultural Studies*, 25(5), 1286–1306.
- Por, S.S. (2023). "Tian Xia"—China's concept of International Order. *Research Series on the Chinese Dream and China's Development Path*, 153–160.
- Qin Yaquin. (2007). Why is There no Chinese International Relations Theory? *International Relations of the Asia-Pacific*, 7(3), 313–340.
- Qin Yaquin. (2011). Development of International Relations Theory in China: Progress Through Debates. *International Relations of the Asia-Pacific*, 11(2), 231–257.
- Ran Ran & Jian Yan. (2021). When Transparency Meets Accountability: How the Fight against the COVID-19 Pandemic Became a Blame Game in Wuhan. *China Review*, 21(1), 7–36.
- Rogers, K., Jakes, L. & Swanson, A. (2020, March 18). *Trump Defends Using "Chinese Virus" Label, Ignoring Growing Criticism*. The New York Times. Diakses pada 7 November 2023, <https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/china-virus.html>
- Rolland, N. (2020). China's Pandemic Power Play. *Journal of Democracy*, 31(3), 25–38.
- Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. *World Politics*, 51(1), 144–172.
- Rosker, J.S. (2013). The concept of harmony in contemporary P. R. China and in Modern Confucianism. *Asian Studies*, 1(2), 3–13.
- Ripsman, N.M., Taliaferro, J.W. & Lobell, S.E. (2016). Neoclassical Realist Intervening variables. Dalam *Neoclassical Realist Theory of International Politics*. Oxford University Press.



- Rudolf, M. (2022, November 27). *How China Uses Health Diplomacy as a Soft Power Tool*. IPS Journal. Diakses pada 23 Oktober 2023, <https://www.ips-journal.eu/topics/how-china-uses-health-diplomacy-as-a-soft-power-tool>
- Scott, J. & Marlow, I. (2020, March 13). *Chinese official pushes conspiracy theory U.S. spread virus*. Bloomberg. Diakses pada 17 Oktober 2023, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/chinese-official-pushes-conspiracy-theory-u-s-army-behind-virus>
- Shakeel, S.I., Brown, M. & Mackey, T.K. (2019). Achieving the End Game: Employing “Vaccine Diplomacy” to Eradicate Polio in Pakistan. *BMC Public Health*, 19(1).
- Sivakumar, B., & Deepthi, B. (2021). Complexity of covid-19 dynamics. *Entropy*, 24(1), 1–62.
- Smith, N.R. (2018). Can Neoclassical Realism Become a Genuine Theory of International Relations? *Journal of Politics*, 80(2), 742–749.
- Sørensen, C.T.N. (2013). Is China Becoming More Aggressive? A Neoclassical Realist Analysis. *Asian Perspective*, 37(3), 363–385.
- Sun Shuangyi, Xie Zhen, Yu Keting & Pan Xiaoting. (2021). Covid-19 and Healthcare System in China: Challenges and Progression for a Sustainable Future. *Globalization and Health*, 17(1), 1-8.
- Sun Yixian & Yu Bowen. (2023). Mask Diplomacy? Understanding China’s Goals in Delivering Medical Aid in The First Wave of the COVID-19 Pandemic. *Journal of Current Chinese Affairs*, 52(3) 381-412.
- Swaine, M.D. (2017, October). *The 19th party Congress and Chinese foreign policy*. Carnegie Endowment for International Peace. Diakses pada 7 Oktober 2023, <https://carnegieendowment.org/2017/10/16>
- Taliaferro, J.W. (2010). Neoclassical Realism and Resource Extraction: State Building for Future War. In *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*. Cambridge University Press.
- Tan Huileng. (2020, February 24). *China’s Xi Rallies People Back to Work as The Country Continues to Battle a Virus Outbreak*. CNBC. Diakses pada 24 Oktober 2023, <https://www.cnn.com/2020/02/24/chinas-xi-jinping-speaks-about-coronavirus-threat>
- Tian Huaiyu, Liu Yonghong & Li Yidan. (2020). An Investigation of Transmission Control Measures During the First 50 Days of The Covid-19 Epidemic in China. *Science*, 368(6491), 638–642.
- Thomas, N. (2020, May 11). *Great Power Responsibility: The Evolution of Chinese Foreign Policy*. MacroPolo. Diakses pada 8 November, 2023, <https://macropolo.org/china-great-power-foreign-policy-covid19/?rp=e>
- Thornton, P.M. (2009). Crisis and Governance: SARS and the Resilience of the Chinese Body Politic. *The China Journal*, 61, 23–48.
- Wang Fei, Turbanisch, F., Schmidt, T. & Fuchs, A. (2020, September 16). *China’s Mask Diplomacy Political and Business Ties Facilitate Access to Critical Medical Goods During the Coronavirus Pandemic*. CEPR. Diakses pada 23 Oktober 2023, <https://cepr.org/voxeu/columns/chinas-mask-diplomacy>
- Wee, Sui-Lee. (2020, September 11). *From Asia to Africa, China Promotes Its Vaccines to Win Friends*. The New York Times. Diakses pada 2 November 2023, <https://www.nytimes.com/2020/09/11/business/china-vaccine-diplomacy.html>
- Wong, C. (2020, May 25). *“Political Virus” is Spreading in America Says Chinese foreign Minister*. SCMP. Diakses pada 27 Oktober 2023, <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3085840>
- Wu Howei & Xu Bin. (2021). Did State-Owned Enterprises Do Better During COVID-19? Evidence From a Survey of Company Executives in China. *Journal of Economics and*

- Xianbai Ji. (2020, February). *Emergency China-ASEAN COVID-19 Meeting: More Than a Solidarity Show*. CGTN. Diakses pada 4 November 2023, <https://news.cgtn.com/news/2020-02-21/Emergency-China-ASEAN-COVID-19>
- Xiang Shunchen. (2023). *Tianxia and Its Decolonial Counterparts: “China” as Civilization, Not Ethnicity*. *China Review*, 23(2), 165–187.
- Xiao Yixiong, Chen Xiang & Li Qiang. (2021). Towards healthy china 2030: Modeling health care accessibility with patient referral. *Social Science & Medicine*, 276(34), 1–21.
- Xinhua. (2018). *Xi Urges Breaking New Ground in Major Country Diplomacy with Chinese Characteristics*. Xinhua, Diakses pada 6 November 2023, http://xinhuane.com/english/2018-06/24/c_137276269.html
- Xu Chenggang. (2011). The Fundamental Institutions of China’s Reforms and Development. *Journal of Economic Literature*, 49(4), 1076–1151.
- Yeophantong, P. & Shih, C. (2021). A relational reflection on pandemic nationalism. *Journal of Chinese Political Science*, 26(3), 549–572.
- Yu Dezhi. (2001). Market-Based Reforms and Changes in China’s Health Care System. *Social Provision in Low-Income Countries*, 265–287.
- Yuan Shaoyu. (2023). The Health Silk Road: A Double-Edged Sword? Assessing the Implications of China’s Health Diplomacy. *World*, 4(2), 333–346.
- Yushi Wang. (2023, August 7). *China’s Medical Exports Tumble as World Moves on From Covid*. Nikkei Asia. Diakses pada 24 Oktober 2023, <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/China-s-medical-exports>
- Zeng Weiwei, Ding Mengli & Liu Hongsong. (2023). China’s Health Silk Road Construction During the COVID-19 Pandemic. *Global Public Health*, 18(1). 1-16.
- Zhao Tingyang. (2005). *Tianxia System: An Introduction of World Institution Philosophy*. Nanjing: Jiangsu Jiaoyu Chubanshe.
- Zhang Feng. (2019). The Xi Jinping Doctrine of China’s International Relations. *Asia Policy*, 14(3), 7–24.
- Zhang Taisu. (2023, March 20). *Xi’s Law-and-Order Strategy*. Foreign Affairs. Diakses pada 27 Maret 2023, <https://www.foreignaffairs.com/china/xis-law-and-order-strategy>
- Zhou Yibiao, Jiang Honglin, Wang Quanyi, Chen Yue & Jiang Qingwung. (2021). Use of Contact Tracing, Isolation, and Mass Testing to Control Transmission of Covid-19 China. *British Medical Journal*, 375, 1–24.
- Zhong Nanshan & Zeng, G. (2006). What We Have Learned from the SARS Epidemics in China. *British Medical Journal*, 333(7564), 389–391.